



TB News

TRIBRATA

AKTUAL & FAKTUAL



MUDIK 2025,
**MEWUJUDKAN
CAPAIAN TERBAIK**



TRIBRATAnews • Edisi III 2025

"Revitalisasi untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Baik"



**Kapolri Ajak Mahasiswa Jaga Persatuan
Untuk Indonesia Lebih Baik**



EDITORIAL

Pelindung
KAPOLRI, WAKAPOLRI

Penasehat
KADIVHUMAS POLRI

Ketua Pengarah
**KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA,
PENATA KEHUMASAN POLRI UTAMA**

Staf Ahli
PARA KABAG DIVHUMAS POLRI

Pemimpin Redaksi
**KOMBES POL. BAMBANG TJAHO BAWONO, S.I.K.,
S.H., M.HUM., M.SI.**

Staf Redaksi
**AKBP Drs. SUWANDA, M.Si.
KOMPOL RUDI HARTONO, S.Kom., S.I.K.,
M.Kom., M.I.K.
PEMBINA AGUSTIN EKAWATI, S.E.
IPTU DITA PRIMA JUWITA, S.I.Kom.
IPDA NIFRINAS YULISTIN RIZKY, S.I.Kom.
PENDA I HARYATI, S.E.
IPDA I DEWA GEDE YUDHA PERWIRA ADHI
PRADNYANA, S.Kom.
BRIGADIR AMANDA SILFIA, S.H.
BRIPDA ALDI RASYID
BRIPDA IRSYAD KOVA ANUGRAH SIREGAR
BRIPDA CINTA AMELIA PUTRI AHMAD**

Art Director
AGUNG SUPRIYANTO WIDADI, S.Ds.

Fotografer
**BAG PRODDOK
DIVHUMAS POLRI**

Penerbit
**BAG PENSAT
DIVHUMAS POLRI**

Kontributor
SATKER MABES/SATWIL POLDA

Percetakan
PT Arfi Dua Satu

Alamat Redaksi
**Bag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri
Jalan Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7218141, 7218770
Faks. (021) 7260208, 7218141**

Penanganan Mudik Terbaik

Momen lebaran memang sudah berlalu dan hiruk pikuknya mereda. Mereka yang semula berbondong-bondong pulang ke kampung halaman sudah kembali dan mulai menjalani rutinitas sehari-hari.

Publik menilai penanganan mudik Lebaran 2025 menjadi yang paling lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya dan menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Bahkan tak kurang, Presiden Prabowo Subianto menyebut kinerja TNI-Polri dan Kementerian Perhubungan sangat membanggakan dan patut dihormati.

Menurut Presiden, Polri menunjukkan kinerja luar biasa meskipun kerap menjadi sasaran kritik dan tetap bekerja tanpa lelah demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Presiden juga menyentil budaya masyarakat yang mudah lupa pada kebaikan namun menghakimi saat ada kesalahan. Hal ini seringkali membuat pengabdian aparat kurang dihargai. Presiden atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Di sisi lain, dalam perspektif negara, mudik harus dianggap sebagai sebuah laboratorium sosial. Menguji kemampuan infrastruktur, kesiapan layanan publik, dan membuat kebijakan yang berpihak bagi rakyat banyak.

Meskipun jumlah pemudik turun dibanding tahun sebelumnya, tantangan dan kompleksitas yang dihadapi Polri sebagai *leading sector* penanganan mudik tetap signifikan.

Keberhasilan penanganan mudik diukur melalui beberapa indikator antara tingkat kepuasan pemudik, penurunan angka kecelakaan lalu lintas, kelancaran arus transportasi, dan efektivitas rekayasa lalu lintas.

Survei tingkat kepuasan pemudik menunjukkan angka rata-rata di atas 90 persen, tingkat kecelakaan lalu lintas turun signifikan hingga 34.31 persen dan arus transportasi yang lancar, baik di jalan raya maupun di stasiun atau bandara. Penerapan rekayasa lalu lintas juga terbukti efektif memangkas waktu tempuh perjalanan.

Dengan keberhasilan mudik Lebaran 2025 merupakan kerja keras semua pemangku kepentingan.

Negara harus melihat mudik Idul Fitri sebagai siklus sosial-budaya yang berdampak luas, dan bukan sebagai siklus keagamaan semata. Tidak lagi sekadar mempersiapkan mudik hanya dari sisi cuti bersama dan pengalihan arus lalu lintas, tapi negara harus memosisikan diri sebagai fasilitator kebahagiaan publik.

Mudik Lebaran 2025 bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga mencerminkan tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat. Pemahaman akan fenomena ini penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat.

Dan semoga pengelolaan mudik Lebaran 2025 bisa menjadi standar dan pengalaman terbaik untuk menghadapi mudik di tahun-tahun mendatang. [*]

Redaksi Majalah **Tribrata News**

menerima kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.
E-mail: pensat.divhumas@gmail.com



08 laporan UTAMA

Lebaran 2025, Penanganan Mudik Terbaik

Mudik aman, keluarga nyaman, menjadi semangat Polri dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat selama Lebaran 2025.

22 UNGKAP KASUS

- SINDIKAT UANG PALSU, LIBATKAN KARYAWAN GARUDA NONAKTIF DAN MANTAN ARTIS



**RANGER MOBRIG,
MENJAGA NEGARA
BERSABUNG NYAWA**



Foto Cover
Polisi mendorong mobil pemudik yang mogok kehabisan bensin di lingkar Loh bener, Indramayu.
Sumber: Istimewa

30 KABAR JAJARAN

- ADU BALAP KURIR SABU DI BIREUN, MEMBURU SINDIKAT GLOBAL

42 INOVASI

- 18 SPPG KOMITMEN POLRI DUKUNG SDM UNGGUL LEWAT MAKANAN BERGIZI

54 BUNGA RAMPAI

- CEGAH PENYELUNDUPAN SENJATA, POLRI USULKAN REKOMENDASI KONKRET

66 INSPIRATIF

- BERMULA DARI HOBI, BRIPKA SUWANTO JADI KOLEKTOR BARANG ANTIK

78 VIRAL

- DINAS YANG MENJADI HOBI DAN SUKARELA MENGAWAL AMBULANS



KEPALA DIVISI HUMAS POLRI
BERSERTA STAF DAN JAJARAN

Mengucapkan



Selamat Memperingati

JUMAT AGUNG

Wafat Yesus Kristus

Semoga peringatan ini menjadi waktu yang penuh berkah, refleksi, dan kedamaian serta kasih pengorbanan menjadi inspirasi bagi kita semua.

18 April 2025



Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menghadiri silaturahmi nasional ormas-komas Islam dan Halalbihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Serbaguna 1 Asrama Haji Jakarta, Kamis 24 April 2025.

Kapolri mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Polri memperkuat serta berperan aktif dalam merawat nilai persaudaraan Indonesia di seluruh lapisan masyarakat.

"Sebagaimana komitmen Polri sejak awal, bahwa kami akan terus merawat bingkai persatuan, kesatuan dan Ukhuwah Bangsa Indonesia," kata Kapolri.

Ditambahkan oleh Kapolri, sinergitas dan soliditas umara dan ulama merupakan kunci utama untuk membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik ke depannya.



"Terjalinnya sinergitas ulama dan umara serta elemen masyarakat lainnya merupakan hal penting. Tentunya ini merupakan kunci guna menghadapi segala macam bentuk tantangan zaman," kata Kapolri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan gedung Pondok Pesantren Al-Inaarah Al-Hikam di kompleks Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Selasa 22 April 2025.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Kapolri didampingi sesepuh dan tokoh karismatik dari Buntet Pesantren KH Adib Rofi'uddin Izza.

Momen ini juga dimanfaatkan Kapolri untuk bersilaturahmi dan meminta doa kepada kiai dan sesepuh Buntet Pesantren untuk keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Setelah diresmikan, Kapolri juga melakukan peninjauan terhadap fasilitas Pondok Al Inaarah Al Hikam Buntet Pesantren. Pondok ini dilengkapi dengan fasilitas 30 kamar santri laki-laki yang dilengkapi lemari dan kasur, 18 kamar mandi, 2 ruang belajar, aula terbuka dan rooftop.

Seperti diketahui, pondok ini dibangun di atas luas tanah 450 meter persegi dengan luas bangunan 1.350 meter persegi yang dibangun dalam 3 lantai.





Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Mapolda Kepri untuk menunjukkan dukungannya terhadap program Ketahanan Pangan dan makan bergizi Gratis (MBG).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah peresmian Pelabuhan Internasional Gold Coast di Golden Prawn Kota Batam, Senin 14 April 2025.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri dan juga unsur muspida di Kepri melakukan penebaran bibit ikan nila, patin, lele dan bawal. Jumlah total bibit ikan yang ditabur sebanyak 257 ribu ekor.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri menegaskan bahwa Kepri memiliki salah satu kawasan yang pertumbuhan ekonominya terus menunjukkan peningkatan. "Kita lihat program-program pembangunan, baik hilirisasi maupun pariwisata, terus berjalan," kata Kapolri.

Kapolri juga menambahkan agar seluruh jajaran kepolisian di Kepri untuk terus berbuat yang terbaik ditengah masyarakat dan menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah sebagai dukungan bagi investor dalam menanamkan modal di Kepri.



Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan bersama insan media. Dalam kesempatan tersebut sebanyak 1.000 paket takjil dibagikan dalam acara yang berlangsung di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin 17 Maret 2025.

Kapolri secara langsung membagikan takjil kepada pengendara yang melintas, disambut antusias oleh masyarakat. Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kabaintelkam Polri Komjen. Pol. Syahardiantono, Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, serta Karomultimedia Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Gatot Repli Handoko, bersama sejumlah perwakilan media.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Polri dan insan media dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

"Alhamdulillah, bersyukur bisa berbagi takjil bersama teman-teman media, khususnya untuk saudara-saudara kita yang akan berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini membawa berkah bagi semuanya," kata Kapolri. [*]





MUDIK 2025, MEWUJUDKAN CAPAIAN TERBAIK

Pengelolaan mudik Lebaran 2025 menjadi yang terbaik selama lima tahun terakhir dengan indikator utama turunnya angka kecelakaan. Diharapkan penyelenggara mudik Lebaran 2025 bisa menjadi standar pelaksanaan mudik pada tahun-tahun berikutnya.

Lebaran 2025, Penanganan Mudik Terbaik

Penurunan angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 2025 merupakan salah satu pencapaian terbaik dalam lima tahun terakhir.



Di tengah puncak riuhnya arus arus balik Lebaran 2025, di antara kendaraan pemudik yang berpacu kembali ke ibu kota, sebuah kisah sederhana nan menyentuh terjadi di Rest Area 319B Tol Pemalang.

Bukan tentang macet atau kendaraan mogok, juga buka tentang tiket hangus atau koper yang tertukar. Tapi tentang seekor kucing dan sebuah keluarga yang hampir putus asa mencari.

Namanya Puso, kucing domestik berbulu putih keabu-abuan yang menjadi bagian dari keluarga Ariyanti, pemudik asal Cakung, Jakarta. Bagi keluarga itu, Si Puso bukan sekadar peliharaan dan sudah dianggap sebagai bagian keluarga.

Kisah bermula ketika Aryanti dan keluarganya berhenti sejenak di *rest area* untuk beristirahat, Sabtu Sabtu 5 April 2025. Di tengah siang yang terik dan penatnya perjalanan, Puso yang berada di dalam mobil dikeluarkan untuk diberi makan dan minum. "Kami takut dia stres kalau terlalu lama di mobil," cerita Ariyanti.

Namun, nasib berkata lain. Ketika Ariyanti beranjak ke toilet bersama anak perempuannya, Puso dititipkan kepada sang suami. Sayangnya, di saat yang sama sang suami teralihkan perhatiannya karena harus mengawasi anaknya yang berlarian ke Pos Polisi dan entah bagaimana ceritanya Puso luput dari pengawasannya. "Kami cari-cari ke mana-mana, sampai keliling *rest area*. Tapi dia menghilang begitu saja," tutur Ariyanti.

Akhirnya, dengan berat hati dan tangis tertahan, keluarga itu melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Tentu saja tanpa Puso.

Tiga hari kemudian, harapan itu muncul kembali. Petugas dari Polres Pemalang, tepatnya di Pos Pelayanan Operasi Ketupat Candi 2025, menemukan seekor kucing dengan ciri yang sama seperti deskripsi yang viral di media sosial.

"Kucingnya sempat mendekat ke pos, dan karena jinak, kami rawat sementara," ujar Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto. "Kami beri makan, minum, dan menunggu jika ada yang mencarinya."



Dan benar saja, setelah melihat unggahan tentang Puso, Ariyanti langsung menghubungi pihak kepolisian. Tak menunggu lama, Puso pun akhirnya bisa kembali ke pelukan pemiliknya.

"Nggak nyangka bisa ketemu lagi. Tadi waktu lihat pertama kali saya sampai gemetaran," ucap Ariyanti terisak. "Rumah kami rasanya kosong banget tanpa dia. Puso itu sudah seperti anak kami sendiri."

Kisah Puso yang bisa kembali bersama keluarga Aryanti memang cerita sederhana. Namun, bagamanapun cerita menjadi oase hangat di tengah padatnya arus balik. Di balik angka-angka statistik mudik, di balik pos-pos pengamanan dan 1001 skenario pengaturan lalu lintas, ada kemanusiaan yang tetap hidup.

Dalam bentuk sepasang tangan polisi yang menyelamatkan kucing kecil, dalam bentuk pelukan keluarga yang utuh kembali. Ya benar, berkat rasa peduli yang tak pandang bulu, bahkan untuk makhluk berbulu.



Coba bayangkan sebentar. Jika hidup seekor binatang peliharaan bisa menjadi begitu penting, penghargaan akan bernilai berkali-kali lipat jika menyangkut nyawa dan kehidupan manusia.

Kini, Puso kembali pulang. Di atas sofa rumahnya di Cakung, ia mungkin tengah merengkuk santai, tak sadar bahwa ia sempat menjadi pusat perhatian publik. Tapi bagi Ariyanti dan

keluarganya, momen itu akan dikenang selamanya bukan hanya sebagai mudik yang melelahkan tapi juga sebagai mudik yang penuh cinta.

Ini selaras dengan tagline yang dicanangkan Mudik Aman, Keluarga Nyaman yang menjadi semangat Polri dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat selama Lebaran 2025.

Bukan Sekadar Berjaga
Operasi Ketupat 2025 tak hanya bicara tentang pengamanan lalu lintas. Ia adalah wajah empati dari aparat terhadap masyarakat. Peristiwa Puso yang viral menunjukkan bahwa di balik seragam terdapat hati yang tetap hangat dan tanpa pamrih mengulurkan tangan.





Untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik tahun ini, Polri menggelar Operasi Ketupat 2025. Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan.

Tak hanya dari kepolisian, operasi ini juga melibatkan unsur TNI, Dishub, Satpol PP, hingga relawan dari organisasi masyarakat. Di sepanjang jalur mudik, berdiri 2.835 pos, terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Pos-pos tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandara,

serta kawasan wisata dan pusat perbelanjaan.

Rekayasa lalu lintas pun diterapkan secara dinamis, dari *contraflow* hingga one way, guna mengurangi kepadatan di titik-titik rawan kemacetan seperti Tol Cipali, jalur Pantura, hingga pelabuhan Merak. Teknologi pun dimanfaatkan, dengan pemantauan CCTV dan aplikasi informasi lalu lintas yang terintegrasi.

Operasi Ketupat 2025 yang berlangsung mulai 23 Maret hingga 8 April untuk delapan Polda prioritas dan 26 Maret hingga 8 April untuk 28 Polda lainnya, mengusung tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman.

Turun Langsung ke Lapangan

Tak hanya para petugas di lapangan, pemantauan juga dilakukan oleh jajaran pimpinan Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, misalnya, meninjau langsung arus mudik Lebaran di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada Jumat, 28 Maret 2025.

Dari ketinggian, Kapolri memantau kondisi lalu lintas, khususnya di KM 70 saat penerapan *contraflow*. Ia menyebut arus kendaraan terpantau padat, namun lancar.

“Hari ini saya mengecek kegiatan di KM 70 untuk memastikan perjalanan serta perkembangan penanganan arus mudik yang dilakukan oleh rekan-rekan di jalur tol,” ujar Kapolri kepada para wartawan.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo juga turut meninjau langsung pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 di Pos Terpadu Km 188 Paliman dan Pos Ramayana Weru, Cirebon, Jawa Barat.



“Ini bukan sekadar operasi rutin, melainkan bentuk pengabdian demi memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan penuh keberkahan,”

Menggunakan helikopter dari Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Komjen Dedi memantau arus lalu lintas dari udara sebelum menyapa para pemudik dan personel di pos-pos pengamanan.

“Ini bukan sekadar operasi rutin, melainkan bentuk pengabdian demi memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan penuh keberkahan,” ungkap Komjen Dedi, Jumat 28 Maret 2025.

Dalam kunjungannya, Dedi mengecek kesiapan personel dan berbagai fasilitas pendukung di lapangan, termasuk logistik, pos kesehatan dengan tenaga medis siaga 24 jam, ketersediaan makanan dan minuman, serta tempat istirahat bagi petugas dengan jam kerja panjang.



Mantan Kadiv Humas Polri itu juga memberikan motivasi langsung kepada petugas dan membagikan bingkisan sebagai bentuk apresiasi. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang proaktif dan humanis serta pengawasan ketat oleh komandan di lapangan. “Lakukan motivasi dari pintu ke pintu kepada personel. Pastikan pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam evaluasi lapangan, Komjen Dedi mencatat arus kendaraan terpantau padat merata, baik di jalur tol maupun arteri dari arah Jakarta ke Jawa Tengah. Jalur arteri banyak dilalui sepeda motor dan truk, yang sebagian masih ditemukan parkir di bahu jalan.

“Parkir liar truk di bahu jalan sangat berisiko menimbulkan kecelakaan, begitu juga pelanggaran kapasitas kendaraan roda dua. Patroli harus ditingkatkan, terutama di titik rawan kemacetan dan pelanggaran,” ungkapnya.

Kerja Sama Stakeholder

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2025 yang dilaksanakan di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Sabtu 12 April 2025 mengatakan suksesnya pengamanan arus mudik dan arus balik tidak lepas dari intervensi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta kerja sama erat dengan semua stakeholder.

Irjen Agus mengatakan Jenderal Sigit memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Kapolri, juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dari semua unsur untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran berlangsung.

“Berkat petunjuk dan arahan Bapak Kapolri dalam Operasi Ketupat tentang perlunya kolaborasi, sinergitas, dan komunikasi stakeholder adalah kunci keberhasilan,” tutur Irjen Agus.

“Saya selaku Kakorlantas Polri dengan hormat menyatakan terima kasih dan rasa bangga yang tinggi atas dedikasi, semangat, kerja keras, kebersamaan, keikhlasan, serta soliditas kita semua dalam menyuksekan, baik sebelum, saat, maupun selesaiannya kegiatan ini.”

Irjen Agus menyampaikan bahwa sejumlah indikator menunjukkan keberhasilan strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan tahun ini.

Salah satu capaian paling menonjol adalah penurunan angka fatalitas hingga 47 persen dibandingkan tahun lalu.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya preventif yang dilakukan Polri. Mulai dari edukasi keselamatan berkendara, penempatan

posko layanan dan pemeriksaan di titik rawan, hingga peningkatan patroli dan pengawasan di jalur padat kendaraan.

Strategi ini diperkuat oleh kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang juga dinilai meningkat. Selain itu, manajemen arus di ruas tol dan jalur arteri disebut berjalan lebih tertib berkat koordinasi lintas sektor.

"Ini bukti bahwa Lebaran tahun ini jauh lebih aman. Kami apresiasi peran semua pihak, termasuk masyarakat, yang telah membantu menciptakan mudik yang selamat dan nyaman," kata Irjen Agus.

Pencapaian Terbaik

Bagaimanapun, penurunan angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 2025 merupakan salah satu pencapaian terbaik dalam lima tahun terakhir. Tercatat, hanya tercatat 2.637 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang masa mudik 2025. Angka tersebut turun sebesar 30 persen dibanding tahun 2024 yang mencatatkan 3.728 kasus.

Keberhasilan ini juga dinilai tak lepas dari sinergitas antarlembaga, khususnya Polri, Kementerian Perhubungan, TNI, serta operator transportasi seperti Jasa Marga dan PELNI. Kelancaran mudik yang minim insiden menjadi bukti konkret hadirnya negara dalam menjamin kenyamanan masyarakat. Negara hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama mudik Lebaran 2025.



"Ini bukti bahwa Lebaran tahun ini jauh lebih aman. Kami apresiasi peran semua pihak, termasuk masyarakat, yang telah membantu menciptakan mudik yang selamat dan nyaman,"

Laporan dari Jasa Marga menyebutkan bahwa sebanyak 2,16 juta kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek selama periode 21 Maret–1 April 2025. Angka tersebut naik 28,1 persen dibanding lalu lintas normal dan 0,6 persen lebih tinggi dibanding Lebaran tahun sebelumnya.

Sementara pada periode arus balik selama periode 31 Maret–5 April 2025, tercatat sebanyak 1.194.225 kendaraan roda empat tercatat masuk kembali ke Jakarta melalui empat gerbang tol utama.

Dari sektor transportasi laut, PT PELNI mengoperasikan 55 kapal (25 penumpang dan 30 perintis) dengan kapasitas angkut 60.212 kursi. Total penumpang selama Angkutan Laut Lebaran 2025 mencapai 416.370 orang. Pelabuhan Makassar tercatat sebagai pelabuhan terpadat dengan 42.257 penumpang, sementara rute terpopuler meliputi Batam–Belawan, Balikpapan–Surabaya, dan Kumai–Semarang.

Data ini mempertegas pentingnya pengelolaan lintas moda transportasi secara terintegrasi dalam mendukung mobilitas nasional selama masa mudik dan balik Lebaran. [*]



Mengubah Jalan Raya Menjadi

RUANG yang Aman



*Pemudik menikmati perjalanan yang lancar
berkat persiapan matang seluruh pemangku kepentingan.*



Pada setiap Lebaran, jalanan Indonesia menjadi saksi pergerakan besar-besaran manusia yang rindu pulang.

Namun, mudik 2025 terasa berbeda. Tidak hanya karena lalu lintas lebih tertib atau karena waktu tempuh yang lebih cepat—tetapi karena rasa aman yang terasa nyata di sepanjang perjalanan.

Di posko-posko terpadu, layar-layar monitor menampilkan rekaman lalu lintas yang mengalir lancar. Di sisi lain, petugas bersiaga penuh, berkoordinasi melalui radio dan layar peta digital. Bukan hanya sekadar menjalankan tugas, mereka adalah penjaga perjalanan jutaan jiwa.

Di balik angka-angka statistik dan skema rekayasa lalu lintas yang rumit, ada satu hal yang tak boleh dilupakan: perjalanan mudik adalah tentang harapan. Tentang orang tua yang menunggu di beranda, anak-anak yang ingin memeluk kakek-nenek mereka, dan keluarga yang menanti kehangatan di meja makan.

Tahun ini, berkat kerja keras banyak pihak, jalanan menjadi lebih dari sekadar aspal dan marka. Jalanan menjadi ruang aman untuk rindu, dan rumah sementara bagi mereka yang sedang dalam perjalanan pulang.

Sementara itu, di balik layar ribuan petugas kini kembali ke markas masing-masing mungkin belum sempat berkumpul dengan keluarga sendiri. Tapi mereka tahu, mereka telah membantu jutaan orang menemukan jalan pulangnya.

Operasi Ketupat tak hanya bicara tentang pengamanan lalu lintas. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik tahun ini, Polri menggelar Operasi Ketupat 2025, yang melibatkan 164.298 personel gabungan. Tak hanya dari kepolisian, operasi ini juga melibatkan unsur TNI, Dishub, Satpol PP, hingga relawan dari organisasi masyarakat.

Di sepanjang jalur mudik, berdiri 2.835 pos, terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Pos-pos tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, serta kawasan wisata dan pusat perbelanjaan.

Rekayasa lalu lintas pun diterapkan secara dinamis, dari contraflow hingga one way, guna mengurai kepadatan di titik-titik rawan kemacetan seperti Tol Cipali, jalur Pantura, hingga pelabuhan Merak. Teknologi pun dimanfaatkan, dengan pemantauan CCTV dan aplikasi informasi lalu lintas yang terintegrasi.



Lalu Lintas Lancar

Perjalanan mudik Maulana Ismail perantau asal Kecamatan Jatilawang, Banyumas mungkin bisa menjadi gambaran betapa lancarnya lalu lintas. Berangkat bersama istri dan dua anaknya dari Pondok Gede, menjelang malam pada Sabtu 29 Maret 2025 ia memutuskan masuk Tol Cikampek dari Gerbang Tol Pondok Gede dan tak menyangka perjalanananya bakalan lancar.

Ruas Tol Cikampek sepanjang 73 km itu bisa ditempuhnya hanya dalam waktu 1 jam 20 menit. Untuk musim mudik, waktu tempuh itu tergolong sangat lancar. Situasi serupa ditemui juga sepanjang ruas Tol Cipali dan beristirahat di Rest Area 130A.

Beristirahat sebentar Maulana menyempatkan diri melihat peta digital perjalanananya. Ia was-was ruas arteri Prupuk-Bumiayu macet. Benar saja, peta digitalnya menunjukkan warna merah. Ia mengubah perjalananya dan membatalkan rencana keluar tol dari GT Pejagan.

"Saya keluar di Gerbang Tol Kertajati terus Majalengka ke selatan arah Ciamis lewat Cikijing dan Kawali. Sampai Ciamis tengah malam dan menjelang pagi sudah sampai rumah di Jatilawang," tutur Maulana.

Ia menyebut di jalur selatan dirinya tak mengkhawatirkan kemacetan karena banyaknya jalur alternatif. Situasinya bisa berbeda jika ia ngotot melintas ruas Prupuk-Bumiayu-Ajibarang yang memang acap menjadi *bottle neck*.

"Macet di manapun di jalur selatan saya tinggal kanan menuju Lintas Selatan-Selatan. Itu bisa lewat Cipari-Sidareja-Jeruk Legi lalu ke Wangon, atau bisa langsung arah Cilacap belok di Tritih," kata dia. "Aman semua jalur Lintas Selatan-Selatan mulus tanpa lubang. Di situ juga banyak pos polisi jadi nggak perlu khawatir."

Cerita serupa juga dituturkan Untung pemudik tujuan Wonosobo. Alih-alih keluar GT Pejagan seperti biasanya, ia memutuskan keluar di GT Tegal di Adiwerha. Dari pintu tol di menelusuri lereng Gn Slamet bagian utara dan tembus di Bobotsari lalu Purbalingga.

"Dari Purbalingga lurus lewat Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman lalu belok kiri ke Klampok. Dari Klampok lancar sampai rumah di Wadaslintang cuma 1 jam 30 menit," kata Untung.

Situasi serupa ditemui Untung saat kembali ke Jakarta, 6 April 2025. Berangkat menjelang sore ia melintasi rute yang sama dan masuk Tol Cipali saat pemberlakuan one way. Alhasil ia sampai ke Jakarta dengan waktu tempuh 10 jam. Ukuran itu terbilang lancar dalam situasi mudik.

Sarat Empati

Tak sekadar menjalankan tugas, pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 juga menunjukkan sisi humanis personel Polri yang bekerja dengan hati nurani dan empati. Berbagai momen menyentuh terekam selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Seperti yang terjadi di simpang Prambanan, Klaten, Minggu, 6 April 2025.

Seorang ibu bersama anaknya tengah menempuh perjalanan dari Jogja menuju Jatinom dengan sepeda motor. Namun malang, kendaraan mereka tiba-tiba mogok dan dalam kepanikan mencari bantuan, seorang polisi mendekat. Ia tidak sekadar berdiri mengatur lalu lintas. ia hadir sebagai penyelamat.

Tanpa ragu, ia membantu mendorong motor, lalu mengantar



“Itu adalah bentuk spontanitas dan rasa tanggung jawab anggota kami,”



ibu dan anak itu keliling mencari bengkel. Sayangnya, tak ada satu pun bengkel yang buka hari itu. Namun, upaya sang polisi tidak berhenti di sana. Ia membawa mereka ke Polsek Kebonarum, tempat di mana keramahan menyambut mereka seperti keluarga.

Tak hanya ditawarkan tempat beristirahat, sang ibu bahkan sempat ditawari motor dinas untuk bisa melanjutkan perjalanan pulang. Di sela kebingungan itu, petugas lainnya juga menunjukkan kepedulian: sang anak diberi jajanan sebagai hiburan kecil yang berarti besar di tengah situasi yang menegangkan.

Setelah beberapa saat, sang polisi akhirnya berhasil menghidupkan kembali motor mereka. Senyum lega pun terlukis di wajah ibu dan anak itu, yang akhirnya bisa melanjutkan perjalanan pulang dengan selamat.

Kisah ini dibagikan sang ibu di media sosial, dan dengan cepat menyebar luas. Banyak warganet mengungkapkan rasa haru dan apresiasi mereka. Di tengah banyaknya berita negatif yang kerap menyoroti institusi kepolisian, kisah ini menjadi oase yang menunjukkan bahwa kebaikan masih hidup, dan polisi bukan sekadar penegak hukum, mereka juga pelayan masyarakat. “Itu adalah bentuk spontanitas dan rasa tanggung jawab anggota kami,” kata Kasihumas Polres Klaten, AKP Nyoto, S.H., M.H.

Ia menegaskan bahwa tindakan itu selaras dengan semangat pelayanan humanis yang tengah digalakkan, terutama di masa-masa krusial seperti mudik Lebaran.

Bagi Polres Klaten, sambung Nyoto, apresiasi dari masyarakat bukan hanya penghargaan moral, tapi juga semangat untuk terus melayani lebih baik. “Pelayanan yang tulus akan selalu jadi prioritas kami,” katanya. [*]

Mudik Sukses, **Polri Tuai Apresiasi Presiden**

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo atas keberhasilan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Presiden juga memberikan penghargaan kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto atas sinergi dan kerja keras yang luar biasa.

Angka kecelakaan dan fatalitas Lebaran 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu lintas yang lancar juga menurunkan tingkat stres pengemudi, yang berdampak positif pada keselamatan di jalan.

"Kita ucapan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras menjaga keamanan selama bulan puasa, saat mudik, dan saat arus balik. Terutama kepada Kapolri, Menhub, dan jajaran TNI," kata Presiden Prabowo dalam acara panen raya serentak di 14 provinsi yang digelar di Majalengka, Senin 7 April 2025.

Presiden menyebut bahwa kinerja TNI, Polri, dan





Kementerian Perhubungan sangat membanggakan dan patut dihormati.

"Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara sebagai pimpinan telah menunjukkan tanggung jawab luar biasa dan layak mendapat penghormatan dari seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden.

Apresiasi kembali serupa kembali disampaikan Presiden

Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa 8 April 2025.

Menurut Presiden, Polri telah menunjukkan kinerja luar biasa selama penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Meskipun kerap menjadi sasaran kritik, menurut Presiden, anggota Polri tetap bekerja tanpa lelah demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

"Polisi paling sering dicaci maki, paling sering disalahkan. Tapi mereka tetap bekerja keras, berdiri di bawah terik matahari demi menjaga lalu lintas dan keamanan kita semua," kata Presiden Prabowo.

Presiden juga mengungkap bahwa budaya masyarakat yang mudah lupa pada kebaikan namun cepat menghakimi saat ada kesalahan, ini menurut Presiden seringkali membuat pengabdian aparatur kurang dihargai. "Saya manfaatkan momen ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus," kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh instansi dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan TNI, yang dinilainya turut berkontribusi dalam kelancaran mudik dan balik tahun ini.

Menurut Presiden meskipun volume kendaraan tahun ini lebih tinggi dari 2024, perjalanan tetap berjalan lancar tanpa kemacetan besar. Bahkan, angka kecelakaan lalu lintas tercatat menurun lebih dari 30 persen, sebuah capaian yang disebutnya sebagai prestasi nasional.

Apresiasi Berbagai Kalangan

Apresiasi serupa juga disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menyoroti sinergi lintas instansi dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Operasi Ketupat 2025. Menhub juga juga menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang berkontribusi pada turunnya angka kecelakaan.

"Yang paling menggembirakan adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas cukup baik, sehingga jumlah kecelakaan menurun secara signifikan. Kami mengimbau para pengguna jalan, terutama pemudik, agar terus mematuhi aturan dan arahan petugas," kata Dudy, Kamis 18 April 2025.



Ia menyebutkan, penurunan angka kecelakaan dan fatalitas pada Lebaran 2025 jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya juga kelancaran arus lalu lintas turut menurunkan tingkat stres pengemudi, yang berdampak positif pada keselamatan di jalan.

"Kalau lalu lintas lancar, pengemudi jadi tidak stres. Ketika mereka nyaman, risiko kecelakaan dan kematian bisa ditekan," kata Menhub.

Pakar transportasi dan keselamatan, Tri Cahyono, menyebut keberhasilan mudik tahun ini tak lepas dari sinergi antara Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Ia menilai sejumlah capaian penting berhasil diraih terutama oleh Korlantas Polri di antaranya adalah waktu tempuh pemudik yang lebih singkat dibandingkan tahun lalu yang terwujud berkat manajemen lalu lintas yang lebih baik di jalur tol.

"Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kita bisa belajar banyak. Tahun ini terlihat manfaat dari evaluasi sebelumnya, sehingga mudik menjadi lebih lancar dan berkesan bagi masyarakat," kata Tri dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat 11 April 2025.

Ia juga menyoroti penurunan angka kecelakaan selama periode mudik tahun ini sebagai bukti nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Saya kira yang paling patut diapresiasi adalah kerja keras semua pihak, khususnya Polri, yang berjaga selama 24 jam tanpa henti," tambahnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur yang menyebut mudik tahun ini berjalan dengan baik dan lancar.



"Alhamdulillah, kita apresiasi penanganan arus mudik oleh Polri dan jajaran perhubungan yang sudah semakin baik. Kami ucapkan terima kasih atas upaya mereka dalam membantu kelancaran arus balik para pemudik yang kembali bekerja," kata Gus Fahrur, Rabu 9 April 2025.

Ia juga menilai bahwa kehadiran dan pengoperasian petugas di jalan tol sangat membantu para pemudik. Respons cepat dari petugas di lapangan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Semoga semua pemudik bisa kembali bekerja dengan baik dan perjalanan ke depannya semakin lancar," kata dia.

Sementara itu, apresiasi juga disampaikan sesepuh Pondok Buntet Pesantren, KH Adib Rofi'Uddin yang menilai kinerja Polri di pengamanan mudik Lebaran tahun ini sukses.

"Kami menyampaikan dari seluruh masyarakat bahwa kemarin ketika acara mudik pulang balik sukses luar biasa, sukses luar biasa," kata KH Adib.





Dia menyoroti angka kecelakaan di mudik Lebaran tahun ini yang drastis. Juga tidak lagi kemacetan panjang hingga membuat perjalanan mudik masyarakat terganggu. "Mulai kecelakaan-kecelakaan sangat minim, semakin baik semakin baik, semua masyarakat menilai," jelas KH Adib.

KH Adib mengapresiasi arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberikan instruksi kepada seluruh personel Polri dalam pengamanan mudik Lebaran.

"Banyak yang ngomong ke saya alhamdulillah Pak Kiai hari ini lancar tidak ada apa-apa. Saya jawab siapa Kapolrinya," kata KH Adib.

Dikofirmasi Survei

Apresiasi dari berbagai kalangan terhadap suksesnya pelaksanaan mudik Lebaran 2025 juga dikonfirmasi hasil survei. Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukkan 91,2 persen responden menyatakan puas atas kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh jajaran Kepolisian.

Sementara itu 96,1 persen pemudik juga memberikan penilaian positif terhadap kondisi infrastruktur jalan, baik tol maupun non-tol, yang digunakan selama perjalanan mudik. Responden menilai jalanan dalam kondisi baik dan rekayasa lalu lintas cukup efektif mengurai kepadatan selama arus mudik.

"Banyak yang ngomong ke saya alhamdulillah Pak Kiai hari ini lancar tidak ada apa-apa. Saya jawab siapa Kapolrinya,"

Survei juga mencatat kepuasan pemudik terhadap berbagai fasilitas pendukung, seperti layanan posko kesehatan 92,9 persen, ketersediaan BBM di rest area 95,8 persen, kebersihan tempat makan 91,1 persen, kenyamanan area istirahat 89,1 persen, dan kondisi toilet 86,2 persen.

Sementara itu aspek pengamanan dan kelancaran lalu lintas juga mendapatkan apresiasi positif. Sebanyak 87,9 persen responden merasa aman selama perjalanan, sedangkan 86,3 persen mengaku puas terhadap kelancaran arus mudik yang dijaga oleh Polantas.

Tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 juga dikonfirmasi

Lembaga survei Semar Political Institute (SPIN) yang menunjukkan 92,6 persen pemudik puas terhadap pelaksanaan mudik.

Survei ini juga menunjukkan bahwa bobot kepuasan pemudik berbanding lurus dengan persepsi positif terhadap kinerja Polantas. SPIN mencatat pelaksanaan mudik tahun ini mencerminkan peningkatan kedisiplinan pemudik dalam berkendara, serta meningkatnya efektivitas kerja sama antar-instansi dan koordinasi antaragensi pemerintah khususnya Polri. Kinerja profesional dan daya responsif yang ditunjukkan aparat di lapangan menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik.

[*]



SINDIKAT UANG PALSU,

Libatkan Karyawan Garuda Nonaktif
dan Mantan Artis

*Pelaku mematok
harga hingga
Rp 90 juta bagi
mereka yang ingin
mendapatkan uang
palsu senilai Rp300
juta.*



Penggerebekan rumah produksi uang palsu di Bogor, Jawa Barat, menjadi pintu masuk terbongkarnya jaringan sindikat pemalsuan mata uang berskala besar. Kasus ini menyeret sejumlah nama yang cukup mencuri perhatian publik. Mulai dari karyawan nonaktif Garuda hingga mantan artis yang pernah menghiasi layar kaca.

Pengungkapan kasus bermula dari sebuah insiden tak terduga yang terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 7 April 2025. Kala itu, seorang petugas menemukan sebuah tas

yang tertinggal dan ternyata berisi tumpukan uang. Jumlahnya tak tanggung-tanggung mencapai Rp316 juta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa uang tersebut bukanlah uang asli.

Mendapati situasi tersebut, petugas stasiun segera berkoordinasi dengan kepolisian. Polisi segera menyusun strategi mengamankan sang pemilik tas.

Benar saja, tak berselang lama, seorang pria berinisial MS (45) datang berniat mengambil tas tersebut. Saat diminta membuka dan memeriksa isi tas, ia sempat menolak. Belakangan MS mengakui

bahwa uang di dalam tas yang dibawanya tersebut memang palsu.

"MS mengakui bahwa uang tersebut palsu. Ini menjadi titik awal dari pengungkapan sindikat pemalsuan uang yang lebih besar," kata Kapolda Tanah Abang, Kapolres Haris Akhmat Basuki.

Penelusuran

Berdasarkan keterangan MS, polisi menelusuri asal-usul uang palsu tersebut. Ia mengaku memperoleh uang tersebut dari dua orang penjual berinisial BI (50) dan E (42). Pendalaman lebih lanjut kemudian mengarah pada pelaku lain yaitu BS (40), yang diketahui



sebagai pemesan uang palsu serta BBU (42), yang juga memiliki peran serupa.

Dalam pengembangan kasus, polisi menangkap pelaku lain berinisial AY (70), yang bertugas sebagai perantara antara pemesan dan pencetak uang palsu.

Melalui informasi dari AY, polisi berhasil mengidentifikasi DS (41) yang bertindak sebagai pencetak uang palsu, DS memproduksi uang palsu tersebut di sebuah rumah yang disediakan oleh pelaku lain berinisial LB (50) di wilayah Bogor.

Penggerebekan rumah tersebut menjadi babak penting dalam penyelidikan. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa 23.297 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu yang setara Rp2,3 miliar. Selain itu, ditemukan pula tumpukan uang palsu yang belum dipotong serta sejumlah peralatan produksi. "Selain rupiah, kami juga menemukan 15 lembar uang palsu dolar AS pecahan USD 100," kata Kompol Haris.

Meski jumlahnya tak sebanyak uang rupiah palsu, keberadaan dolar palsu menunjukkan bahwa sindikat ini memiliki kemampuan untuk memalsukan berbagai mata uang.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa proses pencetakan dilakukan berdasarkan pesanan. Untuk mendapatkan uang palsu senilai Rp300 juta, pemesan harus membayar Rp90 juta menggunakan uang asli. Skema ini menunjukkan bahwa sindikat bekerja secara sistematis dan rapi.



“Kami masih terus mendalami kasus ini dan mengejar kemungkinan keterlibatan pelaku lain, serta menyelidiki ke mana saja uang palsu ini telah beredar,”

Dari Masalah Keuangan Hingga Transaksi Gunakan Uang Palsu

Salah satu nama yang mencuat dalam kasus ini adalah Bayu Setio Aribowo (BS), yang diketahui sebagai karyawan Garuda Indonesia. Pihak maskapai membenarkan bahwa BS adalah pegawai mereka, namun sudah berstatus cuti di luar tanggungan perusahaan (CDTP) sejak 2022.

Direktur Human Capital & Corporate Services Garuda Indonesia, Enny Kristian, menyatakan bahwa perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai prosedur kepegawaian. Sanksi internal pun disiapkan, termasuk kemungkinan pemberian surat peringatan tingkat III (SP3).

“Pengenaan sanksi akan mengacu pada perkembangan proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Enny.

Bayu mengaku terlibat dalam pemesanan uang palsu karena mengalami masalah keuangan terkait bisnis pribadinya.

Sementara itu, sindikat uang palsu juga melibatkan publik figur lain yakni mantan artis bernama Sekar Arum Widara (41). Ia ditangkap polisi setelah kedapatan bertransaksi menggunakan uang palsu di sebuah pusat perbelanjaan di Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu 2 April 2025.

Sekar sempat melakukan pembelian di dua toko. Namun, di toko kedua, kasir yang menerima pembayaran curiga terhadap 11 lembar uang yang digunakan. Setelah dicek, uang tersebut dinyatakan palsu. Sekar pun langsung diamankan oleh petugas keamanan mal dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam pemeriksaan, Sekar mengaku mendapatkan uang palsu dari temannya, Bayu Setio Aribowo. Ia menyebut uang itu diberikan secara cuma-cuma, tanpa mengetahui bahwa akan berujung pada proses hukum.

“SAW mengaku bahwa B adalah orang yang memberikannya uang tersebut, dan B sudah diamankan di Polsek Tanah Abang,” jelas Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi.



Peran Tersangka

Dari hasil pemeriksaan, berikut peran masing-masing tersangka dalam sindikat uang palsu:

Bayu Setio Aribowo (BS): Pemesan uang palsu, karyawan Garuda nonaktif BBU (42); Pemesan uang palsu, MS (45); Pembawa tas berisi uang palsu, BI (50) dan E (42); Penjual uang palsu. AY (70): Perantara antara penjual dan pencetak, DS (41): Pencetak uang palsu

LB (50): Penyedia tempat produksi, Sekar Arum Widara (41): Pengguna uang palsu dalam transaksi

Para pelaku diberat dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 244 KUHP dan/atau Pasal 245 KUHP. Ancaman hukuman bagi para pelaku maksimal 15 tahun penjara.

“Kami masih terus mendalami kasus ini dan mengejar kemungkinan keterlibatan pelaku lain, serta menyelidiki ke mana saja uang palsu ini telah beredar,” ujar Kompol Haris. [*]



BARESKRIM BONGKAR SINDIKAT FAKE BTS, Pelakunya WNA China

Kasus terungkap dari laporan nasabah sebuah bank swasta yang menerima SMS mencurigakan. Penyelidikan menemukan pesan serupa diterima ratusan nasabah lainnya.

STR

FAKE BTS

Kepolisian Republik Indonesia kembali mengungkap kejahatan siber skala internasional yang memanfaatkan teknologi untuk menipu masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat penipuan menggunakan perangkat Base Transceiver Station (BTS) palsu.

Dalam pengungkapan ini, dua warga negara China ditangkap karena terlibat langsung dalam penyebaran SMS penipuan berbasis fake BTS.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena metode yang digunakan pelaku terbilang canggih dan merugikan sejumlah nasabah perbankan hingga ratusan juta rupiah.

Modus Penipuan

Penipuan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat yang menyerupai BTS asli milik operator seluler. Perangkat ilegal ini mampu mengelabui ponsel di sekitarnya seolah-olah sinyal berasal dari jaringan resmi. Melalui perangkat ini, pelaku menyebarluaskan SMS berisi tautan phising secara massal tanpa melalui sistem operator resmi.



"SMS penipuan itu disebarluaskan secara otomatis menggunakan perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh oleh bos sindikat," ujar Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, Senin 24 Maret 2025.

Isi pesan tersebut umumnya berupa pemberitahuan hadiah atau promo palsu dari institusi keuangan yang disertai tautan untuk mengisi data pribadi. Korban yang terjebak kemudian memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening, PIN, hingga OTP, yang akhirnya digunakan pelaku untuk menguras rekening mereka.

Laporan Nasabah

Penelusuran kasus ini bermula dari laporan seorang nasabah bank swasta yang mengaku menerima SMS mencurigakan. Dari penyelidikan lebih lanjut, diketahui pesan tersebut diterima oleh setidaknya 259 nasabah lainnya. Dari jumlah itu, delapan nasabah terjebak dalam skema penipuan dan kehilangan uang dengan total kerugian mencapai Rp289 juta.

Pengaduan diterima polisi pada 13 Maret 2025. Hanya berselang beberapa hari, pada 18 Maret 2025, Bareskrim berhasil menangkap tersangka pertama, WN China berinisial XY, saat mengendarai mobil Toyota Veloz di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Dua hari kemudian, pelaku kedua, YXC, juga ditangkap saat sedang mengemudikan Toyota Avanza putih di kawasan Tulodong Atas.

Kedua tersangka diketahui membawa serta perangkat fake BTS di dalam kendaraan, yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyebar SMS phising saat mobil melintasi area ramai.

"SMS penipuan itu disebarluaskan secara otomatis menggunakan perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh oleh bos sindikat,"



Peran Tersangka

Bareskrim menetapkan XY dan YXC sebagai tersangka dan langsung menahan keduanya di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku mengaku hanya menjalankan perintah. Mereka bertugas sebagai "sopir keliling" sambil membawa perangkat BTS palsu untuk menyebarkan SMS penipuan.

"Pelaku XY datang ke Indonesia sejak 18 Februari 2025 dan diajarkan oleh seseorang berinisial XL untuk mengoperasikan fake BTS," jelas Komjen Wahyu.

Sementara itu, YXC mengaku telah beberapa kali keluar masuk Indonesia sejak tahun 2021 dengan menggunakan visa turis. Ia disebut mengikuti arahan dari sosok lain berinisial JYX,

yang diduga merupakan orang kepercayaan bos sindikat internasional. Menariknya, kedua tersangka tidak memiliki keahlian teknis dalam hal rekayasa perangkat, menguatkan dugaan bahwa mereka hanya 'operator lapangan'.

Bareskrim juga menemukan fakta bahwa komunikasi antara para anggota sindikat dilakukan melalui aplikasi Telegram, tepatnya melalui grup bernama "Stasiun Pangkalan Indonesia". Dari grup inilah para tersangka menerima instruksi untuk melakukan penyebaran SMS phising.

Dioperasikan dari Luar Negeri

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa sindikat ini dikendalikan dari luar negeri.





Seluruh aktivitas penyebaran pesan, termasuk teks SMS yang akan disebar, telah diatur secara otomatis oleh pengendali melalui grup Telegram.

"Perintahnya diberikan dari luar Indonesia. Mereka menggunakan sistem remote untuk mengendalikan perangkat yang dibawa para tersangka," jelas Himawan.

Pelaku memanfaatkan situasi padat lalu lintas dan keramaian di kawasan SCBD dan sekitarnya untuk memperluas jangkauan pesan. Salah satu tersangka mengemudikan mobil sambil menyalakan perangkat fake BTS dan meletakkan tiga unit ponsel di atas perangkat tersebut untuk mendeteksi dan mengirim SMS ke ponsel-ponsel di sekitarnya.

Meski belum menerima bayaran, pelaku XY dijanjikan imbalan sebesar Rp22,5 juta, sedangkan YXC dijanjikan Rp 21 juta atas tugas yang mereka jalankan.

Pidana Berat Mengintai

Kedua tersangka dijerat dengan berbagai pasal dari sejumlah undang-undang, mulai dari UU ITE hingga UU Telekomunikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukuman maksimal mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar.

Polisi juga memasukkan sejumlah nama lain yang terlibat dalam sindikat ini ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Tidak terkecuali pengendali utama berinisial JYX yang diduga kuat sebagai otak dari operasi penipuan ini.

Bareskrim kini tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi serta kepolisian internasional untuk memburu pelaku lain yang masih buron. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap SMS mencurigakan dan tidak sembarangan mengklik tautan atau membagikan informasi pribadi. [*]





Adu Balap Kurir Sabu di Bireun, Memburu Sindikat Global

Penangkapan kurir sabu seberat 192 kilogram berlangsung dramatis. Kejar-kejaran menggunakan mobil hingga tabrakan dengan truk. Kini, polisi masih memburu otak di balik jaringan lintas negara.



Mobil sedan Honda City itu melaju kencang di ruas Jalan Raya Banda Aceh-Medan, tepat di kawasan Pandrah Kandeh, Kabupaten Bireun, Aceh, dini hari. Tak lama setelah fajar menyingsing, kendaraan berpelat BL-1339-VZ itu tiba-tiba membelok melawan arah.

Dalam sekejap, dentuman keras terdengar-mobil itu menghantam sebuah truk. Kejar-kejaran antara polisi dan kurir narkoba berakhir dengan kecelakaan tunggal.

Di balik kemudi mobil itu, duduk seorang pria 36 tahun bernama Mustafa. Wajahnya masih diliputi debu ketika petugas menggirinya keluar. Dari bagasi sedan itu, polisi mengangkut sepuluh karung berisi sabu seberat 192 kilogram.

"Tersangka selamat. Kami langsung amankan barang bukti dan membawanya ke markas untuk pemeriksaan lanjutan," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Eko Hadi Santoso, Senin, 14 April 2025.

Mustafa, yang diketahui berprofesi sebagai petani di Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, mengaku hanya kurir. Ia diperintahkan oleh seseorang berinisial R, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Kepada penyidik, Mustafa berdalih tak tahu pasti ke mana sabu-sabu itu akan dikirim. "Ia hanya diminta menjemput paket dan menunggu instruksi berikutnya," ujar Eko.

“Tersangka selamat. Kami langsung amankan barang bukti dan membawanya ke markas untuk pemeriksaan lanjutan,”



Dari Laut ke Jalan Raya

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang diterima Tim Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim awal April lalu. Ada sinyal kuat bahwa sindikat narkotika internasional jaringan Malaysia-Indonesia akan mengirim sabu dalam jumlah besar ke Aceh, lewat jalur laut di Selat Malaka. Pada Minggu, 6 April 2025, tim mendapat informasi bahwa sebuah boat berisi sabu telah bergerak menuju pantai utara Aceh.

Dua tim segera dibentuk: satu tim laut yang bekerja sama dengan kapal patroli Bea Cukai, dan satu tim darat yang bersiaga di titik-titik pendaratan potensial. Selasa dini hari, 8 April 2025, sekitar pukul 02.20 WIB, sumber informasi mengabarkan bahwa boat telah merapat dan muatan sabu telah berpindah ke tangan penerima darat.

Tim darat segera bergerak menuju wilayah Pandrah, salah satu kawasan pesisir yang kerap dijadikan lokasi transit narkoba. Di sana, mobil Honda City yang dikemudikan Mustafa mulai terpantau. "Kami mendeteksi kendaraan target melintas di jalur utama. Saat didekati, ia mencoba melarikan diri dengan melawan arus," ujar Eko. Aksi itu berujung pada tabrakan dengan truk, sebelum akhirnya Mustafa dibekuk.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan karung-karung berisi sabu yang dibungkus rapi. Berat totalnya mencapai 192 kilogram—salah satu tangkapan terbesar di Aceh dalam tahun ini. Eko menyebut ini bukan pengiriman sembarangan, melainkan bagian dari jaringan rapi lintas negara. "Dari hasil interrogasi, tersangka mengaku bekerja untuk jaringan R, yang kami duga terhubung dengan sindikat Malaysia," katanya.



Dibayar Setelah Barang Sampai

Motif Mustafa menjadi kurir narkoba masih terus didalami. Namun, dari keterangan sementara, ia dijanjikan upah yang tidak disebutkan nominalnya. Syaratnya, paket sabu harus sampai ke lokasi tujuan—yang, ironisnya, tak pernah diberitahu pasti kepadanya.

Polisi kini fokus membongkar jaringan di atas Mustafa. Target utama mereka adalah R, sosok yang disebut-sebut memberi perintah, namun hingga kini jejaknya belum berhasil ditemukan. Tim Bareskrim masih memburu R dan kemungkinan kaki tangan lainnya yang berada di wilayah Aceh dan luar negeri.

Pengiriman sabu dalam jumlah besar melalui jalur laut semakin sering terjadi, seiring ketatnya pengawasan udara dan darat. Aceh menjadi salah satu titik rawan karena posisinya yang strategis dan banyaknya jalur tikus di sepanjang pesisir.



Disorot Parlemen

Kasus ini memantik perhatian parlemen. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengapresiasi keberhasilan Polri membongkar jaringan narkoba internasional yang masuk lewat Aceh. Ia menyebut penangkapan Mustafa dan penyitaan sabu seberat hampir dua kuintal sebagai bukti keseriusan aparat dalam memerangi kejahatan transnasional.

“Ini menunjukkan bahwa Polri tetap konsisten dalam menjalankan fungsi penegakan hukum,” kata Rano dalam keterangan tertulis dari Jakarta, Selasa, 15 April 2025.

Namun, Rano mengingatkan bahwa pengungkapan ini baru langkah awal. Menurutnya, aparat tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Pengusutan harus menjangkau aktor intelektual di balik layar. “Termasuk di dalamnya siapa pemodal,



koordinator lintas negara, dan bila ada, oknum instansi negara yang terlibat,” tegasnya.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Rano juga mendesak agar penyidikan dilakukan secara akuntabel dan transparan. Ia mendorong agar polisi melakukan penelusuran aset milik pelaku untuk mendukung strategi pemiskinan bandar narkoba. “Aset hasil kejahatan jangan dibiarkan. Harus disita dan digunakan untuk mendanai pemberantasan narkoba,” katanya.

Rano juga mendorong penguatan kerja sama internasional, khususnya dengan aparat penegak hukum di Malaysia dan negara-negara transit lain. “Kita perlu membongkar rantai pasok narkotika lintas negara yang menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur masuk,” ujarnya. [*]

Operasi AB Moskona 2025, Upaya Mencari Iptu Tomi Samuel

Operasi AB Moskona menjadi upaya ketiga sejak Iptu Tomi Samuel Marbun hilang Kali Rawara 18 Desember 2025 silam.

Kepolisian Daerah Papua Barat menggelar operasi bersandi Alfa Bravo Moskona 2025 sebagai upaya pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun. Operasi ini merupakan pencarian tahap ketiga sejak mantan Kasat Reskrim Teluk Bintuni tersebut dilaporkan hilang 18 Desember 2024.



“Catur Prasetya adalah pedoman kerja kita, yang secara tegas menyatakan bahwa sebagai insan Bhayangkara, kehormatan tertinggi kita adalah berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara,”

Dalam apel gelar pasukan di Lapangan Apel Polres Teluk Bintuni, Selasa 22 April 2025, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk dalam zona merah karena aktivitas KKB, dengan medan berat berupa hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras. Karena itu, personel dituntut memiliki kesiapan fisik, mental, dan pemahaman SOP yang kuat.

Kapolda juga menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam penggunaan peralatan, komunikasi, serta kepatuhan terhadap SOP, khususnya bagi personel yang membawa senjata api.

“Catur Prasetya adalah pedoman kerja kita, yang secara tegas menyatakan bahwa sebagai insan Bhayangkara, kehormatan tertinggi kita adalah berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Kapolda.

Operasi AB Moskona 2025 yang berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 21 April hingga 3 Mei 2025. Sebelumnya upaya pencarian Iptu Tomi Samuel sudah dilakukan dalam dua tahap. Operasi pertama berlangsung sejak 18 Desember 2024 lantas dihentikan sementara pada 30 Desember 2024. Sedangkan pencarian tahap kedua dilakukan 27 Januari hingga 2 Februari 2025.

Operasi pencarian tahap ketiga ini melibatkan sebanyak 510 personel gabungan yang terdiri dari 155 personel dari Mabes Polri, 191 personel Polda Papua Barat, 74 personel Polres Teluk Bintuni, 16 personel Kodam XVIII/Kasuari, dan enam personel Kodim 1806/Teluk Bintuni, 19 personel Basarnas dan 30 personel Satuan Tugas Yonif 642/Kapuas serta empat personel Pasukan Marinir III Sorong dan 15 personel dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

Iptu Tomi Samuel dilaporkan hilang ketika menyeberang Kali Rawara di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat. Saat itu ia tengah memimpin operasi penangkapan pimpinan KKB Marthen Aikingking.

Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kegiatan meliputi pencarian, olah TKP, dan rekonstruksi kejadian hilangnya Iptu Tomi Samuel mulai dari lokasi TKP hingga Muara Sebyar Aranday.

“Kami sudah mempertimbangkan seluruh potensi ancaman, termasuk gangguan dari KKB, dan telah menyiapkan langkah antisipatif,” kata Kabidhumas.

Metode pencarian dilakukan dengan menyisir daerah aliran sungai mulai dari lokasi awal Iptu Samuel dinyatakan hilang hingga ke muara. Lokasi pencarian dibagi ke dalam tiga zona yakni zona merah, area rawan kelompok kriminal bersenjata (KKB), akan disisir oleh TNI-Polri. Sedangkan zona kuning area yang mendekati wilayah KKB, menjadi tanggung jawab Basarnas dengan pengawalan TNI-Polri. Sedangkan zona hijau merupakan area yang dianggap aman.



Tim SAR Ditembak

Benar saja di tengah upaya pencarian tersebut Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey orang tak dikenal. Komnas HAM terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat 25 April 2025 dan terlibat dalam rekonstruksi serta olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu 26 April 2025. Hari berikutnya, ia bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah tiba-tiba datang tembakan ke arah mereka.



"Ketika kami turun pukul 06.00 WIT lewat, kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata," tutur Frits.

"Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi."

Meski tidak ada korban, Frits mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

"Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini," katanya menambahkan.

Sebelumnya, dalam upaya menemukan Iptu Samuel Tomi tim olah TKP dari Pusident Bareskrim Mabes Polri telah melaksanakan gelar perlengkapan di Mapolda Papua Barat, bekerja sama dengan Wadir Krimum Polda Papua Barat dan Siident Ditreskrim pada 19 April 2025.

Peristiwa hilang Iptu Tomi Samuel Tomi menyita perhatian nasional dan menjadi kehilangan besar bagi keluarganya terutama bagi sang istri, Riah Ukur Tarigan. Dia mengungkapkan bahwa percakapan



Pengecekan Kesiapan Misi Kemanusiaan Operasi Alpha Bravo Moskona 2025

DIVISI HUMAS POLRI



terakhirnya dengan sang suami pada 15 Desember 2024 ingin berbicara empat mata.

"Saat saya pulang, suami ternyata sudah tidak di rumah. Kami tidak sempat ngobrol, Sore hari saat suami pulang saya bertanya mau ngobrol apa. Tapi dia bilang tidak jadi. Dia hanya meminta dikirimkan sejumlah uang transportasi untuk memfasilitasi operasi senyap ini," kata Riah.

Pada 16 Desember 2024, Tomi masih berkirim pesan kepada istrinya mengabarkan akan bertugas ke hutan dan meminta istri antisipasi ketika terjadi hal buruk. Termasuk mengirim kontak orang-orang yang harus saya hubungi kalau terjadi hal buruk terjadi kepadanya.

"Saya sempat mengontak nomor yang sudah diberikan dan merekalah yang membantu helikopter untuk keluarga. Hingga hari ini cuma suami saya yang belum kembali," tutur Ria. Pihak keluarga terus berupaya melakukan pencarian Iptu Samuel Tomi, tetapi tak kunjung membawa hasil. Keluarga bahkan telah mengadu ke Komisi III DPR yang kemudian merekomendasikan pembentukan tim pencari fakta dan pencarian tahap ketiga.

Selama bertugas, Iptu Tomi Samuel dikenal sebagai polisi yang bermasyarakat dan berdedikasi tinggi. Ia bahkan sempat mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah berhasil mengungkap pelaku pembunuhan empat pekerja Jalan Trans Papua Barat di Moskona Barat pada 22 September 2022. [*]

JAMBORE KARHUTLA 2025,

Komitmen Membangun Etika Lingkungan

Jambore Karhutla 2025 menjadi momentum penting untuk membangun solidaritas lintas sektor serta dan memperkuat edukasi lingkungan kepada generasi muda, khususnya generasi Z.

TAHURA - SULTAN SYARIF HASYIM RIAU
25-27 APRIL 2025



Riau menyelenggarakan Jambore Karhutla 2025 sebagai bentuk komitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini menjadi ancaman rutin.

Diprakarsai Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, jambore ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan Jambore Karhutla Riau 2025 di Bumi Perkemahan Tahura Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau, Jumat 25 April 2025.

Dalam amanatnya, Kapolri mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan seluruh Forkopimda Riau atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui pencegahan Karhutla.

Menurut Kapolri dengan luas mencapai 95,5 juta hektar, potensi kekayaan hutan yang dimiliki

Indonesia sangat besar. Menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan kawasan hutan terluas di dunia, dan berfungsi sebagai salah satu 'paru-paru dunia'.

"Namun di sisi lain, kondisi kawasan hutan yang luas juga memiliki tantangan serius, yaitu terjadinya deforestasi, yang salah satu penyebab utamanya adalah karhutla," kata Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan sepanjang tahun 2024, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 376 ribu hektar. Provinsi Riau menempati urutan ke-11 sebagai wilayah Karhutla terbesar dengan luas lahan terbakar mencapai 11 ribu hektar.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak asap yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan di wilayah Provinsi Riau, melainkan dapat meluas ke Provinsi lain bahkan negara tetangga.



Jambore Karhutla Riau 2025 dilaksanakan selama 3 hari sejak 25 hingga 27 April 2025, dan diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari organisasi Pramuka, OSIS, Sispala, PMI, Karang Taruna dan para pemuda Riau.

Mengusung semangat "Siap, Tanggap, Tangguh", peserta jambore mengikuti berbagai pelatihan mitigasi bencana, simulasi penanggulangan karhutla, diskusi lingkungan, serta aksi tanam pohon sebagai wujud nyata kontribusi generasi muda untuk bumi.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menjelaskan Jambore Karhutla 2025 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan harus menjadi momentum penting untuk membangun solidaritas lintas sektor serta memperkuat edukasi lingkungan kepada generasi muda, khususnya pelajar generasi Z.

"Jambore Karhutla 2025 ini adalah ruang edukasi langsung yang menyasar generasi muda agar paham bahwa membakar hutan itu merusak, dan harus dihentikan. Harapannya, hutan di Riau ke depan lebih terjaga oleh generasi yang peduli lingkungan," kata Kapolda Riau.

Ia menambahkan, Jambore Karhutla 2025 sejalan dengan visi Green Policing yakni

pendekatan kepolisian yang pro-lingkungan melalui edukasi, kemitraan, serta penegakan hukum yang berwawasan ekologis.

Melalui pendekatan ini, kepolisian tidak hanya bertindak saat bencana terjadi, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat dan membangun budaya sadar lingkungan sekaligus menunjukkan langkah pencegahan bisa dimulai dari pendidikan dan kolaborasi.

Jambore Karhutla 2025 juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Gerakan Indonesia Menanam (GERINA) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Etika Lingkungan

Pendiri Tumbuh Institute, Rocky Gerung, menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Jambore Karhutla 2025 bukan sekadar perkemahan biasa, melainkan kampanye serius untuk mencegah karhutla sekaligus menghidupkan kembali etika lingkungan.

Rocky Gerung hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara tersebut bersama Dr. Dolly Priatna dan Dr. Robertus Rob (Belantara Foundation), Okto Yugo Setyo (Jikalahari), serta Dr. Elviadri.

Beberapa narasumber dari Malaysia juga akan berpartisipasi untuk berbagi gagasan





"Mulai 25 April ini, kita akan memastikan bahwa yang kita ekspor bukan lagi asap, tetapi inisiatif etika lingkungan yang bermanfaat. Ini dimulai oleh Kapolda Riau yang telah mengampanyekan etika lingkungan, didukung oleh Gubernur Riau yang juga memahami pentingnya hal ini,"

dalam upaya pencegahan karhutla dan pelestarian lingkungan, khususnya di Bumi Lancang Kuning.

"Saya berada di Pekanbaru untuk mempersiapkan sebuah acara nasional, bahkan global, karena kita akan memulai kampanye serius untuk melindungi bumi dari kerusakan. Kita ingin agar kebakaran hutan dan lahan tidak lagi terjadi di Riau. Selama ini, Riau kerap menjadi sorotan karena 'mengekspor' asap ke negara tetangga," kata Rocky.

Menurutnya, mitigasi kolaboratif yang digagas oleh Polda Riau bersama Pemprov Riau harus dianggap sebagai bagian dari realisasi komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Rocky juga menyebut Jambore Karhutla 2025 sebagai awal dari "titik nol", yakni komitmen bersama untuk memulai upaya pemulihan lingkungan dari nol demi mencapai Riau tanpa karhutla.

"Mulai 25 April ini, kita akan memastikan bahwa yang kita ekspor bukan lagi asap, tetapi inisiatif etika lingkungan yang bermanfaat. Ini dimulai oleh Kapolda Riau yang telah mengampanyekan etika lingkungan, didukung oleh Gubernur Riau yang juga memahami pentingnya hal ini," kata dia. [*]



NOVASI

SPPG

**Komitmen Polri Dukung
SDM Unggul Lewat
Makanan Bergizi**



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang tersebar di berbagai daerah. Peresmian pusatnya berlangsung di Pejaten, Jakarta Selatan, dengan simbolik pengguntingan pita dan pemberangkatan kendaraan distribusi makanan bergizi.

"Ini bagian dari komitmen Polri untuk mendukung penuh program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, khususnya terkait penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit saat memberi sambutannya, Senin 17 Maret 2025.

Peresmian tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Turut mendampingi Kapolri dalam kunjungan itu, Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Irwasum Komjen Dedi Prasetyo, dan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada.

SPPG Polri berdiri di atas lahan seluas 1.772 meter persegi di Pejaten yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas meliputi dapur produksi, ruang sortir bahan makanan, gudang buah dan sayur, gudang kering dan basah, hingga kebun hidroponik sebagai sumber bahan pangan segar.

SPPG ini dirancang sebagai dapur pusat dengan kapasitas besar untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi ke titik-titik sasaran, seperti sekolah dan komunitas rentan gizi.



100 Dapur MBG

Jenderal Sigit menegaskan bahwa peluncuran 20 SPPG ini baru tahap awal. Polri menargetkan pembangunan 100 unit SPPG hingga pertengahan tahun 2025. "Pada Mei hingga Juli nanti, kami akan tambah sampai 100 SPPG baru di berbagai daerah. Kami lihat kebutuhan di lapangan dan akan sesuaikan dengan peta rawan gizi," jelasnya.

Komitmen Polri ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk DPR RI. Wakil Ketua Komisi III, Rano Alfath, menyatakan dukungannya terhadap upaya Polri mengintegrasikan program keamanan dengan layanan sosial.

"Polri tak hanya hadir untuk keamanan, tapi juga ikut menyelesaikan persoalan mendasar seperti ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Ini langkah penting dalam reformasi pelayanan publik," kata Rano, Selasa 18 Maret 2025.

Tantangan Gizi

Program MBG yang menjadi prioritas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilatarbelakangi oleh persoalan serius tentang kualitas gizi anak Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* nasional masih berada di angka 21,6 persen. Sementara itu, target RPJMN 2024 adalah menurunkan angka tersebut hingga 14 persen.

"Program MBG ini sangat strategis karena menyasar langsung akar masalah ketimpangan sumber daya manusia Indonesia, yakni gizi anak yang rendah," kata Diah Suryani, pakar gizi masyarakat dari Universitas Indonesia.

Diah menyebut bahwa intervensi gizi seperti yang dilakukan melalui SPPG Polri dapat berkontribusi signifikan jika dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan.

Lintas Sektor

Selain meresmikan dapur dan mendistribusikan makanan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Komitmen serupa juga ditandatangani oleh para Kapolda



yang hadir dalam peresmian, sebagai bentuk kesiapan memperluas jangkauan program di wilayah masing-masing.

"Kolaborasi antara aparat keamanan, kementerian teknis, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam mempercepat distribusi manfaat program ini," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

La menekankan bahwa keberadaan dapur besar seperti SPPG mampu mengatasi tantangan logistik di daerah yang minim akses pangan segar. Model ini disebut akan direplikasi di daerah terpencil, pesisir, dan kawasan rawan pangan.

Proyeksi dan Evaluasi

Sejauh ini, belum ada proyeksi resmi jumlah penerima manfaat dari 20 SPPG yang diresmikan. Namun, jika satu SPPG dapat



melayani 1.000 anak per hari, maka potensi penerima manfaat mencapai 20 ribu anak per hari. Dengan 100 dapur aktif, angka itu bisa meningkat menjadi 100 ribu per hari.

Namun, pelaksanaan program MBG juga harus diawasi agar tidak hanya menjadi proyek jangka pendek atau sekadar formalitas peluncuran. Dosen kebijakan publik dari UGM, Yanuar Nugroho, mengingatkan pentingnya integrasi dengan sistem pengawasan sosial.

"Program ini akan sangat efektif jika dikawal transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, dan evaluasi rutin berbasis data. Jangan sampai menjadi beban baru tanpa output yang terukur," kata Yanuar.

Peluncuran SPPG Polri menjadi langkah awal yang menjanjikan dari komitmen pemerintahan baru untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat melalui pemenuhan gizi dasar.

Sinergi antara institusi keamanan, lembaga pendidikan, dan sektor pangan adalah pilar penting dalam menjamin keberlanjutan program ini. Jika dikelola dengan baik, dapur-dapur ini bisa menjadi simbol transformasi Polri sebagai pelayan publik yang lebih inklusif. [*]



NOVASI



Kopi Keliling, Cara Polres Lingga Menyeduh Kepercayaan Masyarakat

*Menggunakan sepeda motor, Program Kopi Keliling
menyambangi masyarakat dengan cara sederhana namun mengena.*

Jika Jakarta memiliki starling atau Starbuck Keliling yang menjual kopi menggunakan sepeda atau motor dengan menyarap pekerja kantoran, Satbinmas Polres Lingga memiliki andalannya sendiri.

Menggunakan sepeda motor, personel Satbinmas berkeliling menyambangi warga masyarakat sekaligus menawarkan kopi sebagai 'teman' ngobrol santai.

Program itu diberi nama Koling atau Kopi Keliling yang diadopsi menjadi program pembinaan masyarakat. Tak perlu bayar, warga bisa menikmati kopi tersebut secara gratis!

Mengendarai motor dinas yang dimodifikasi dengan box alumunium, Briptu Eko Daryanto bersama sejawatnya dari Satbinmas Polres Lingga nyaris setiap hari mengelilingi Kecamatan Singkep.

Dengan box di motornya tertulis 'Waktunya ngopi, karena kita butuh inspirasi bukan halusinasi. Jom kita ngopi sambil bercerita sama Pak Eko' mereka rajin menyenggahi nelayan yang berkumpul.

Tak sekadar singgah dan menyapa polisi-polisi itu juga menawarkan kopi gratis sebagai 'teman' ngobrol santai. Itulah mengapa motor dinas para

Bhabinkamtibmas di Polres Lingga dimodifikasi dengan box berisi kopi, termos hingga gelas.

Menghadirkan solusi kreatif dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat, Polres Lingga meluncurkan program inovatif bertajuk Kopi Keliling (Koling) Gratis. Program Koling hadir sebagai jembatan untuk membangun komunikasi yang lebih akrab antara aparat kepolisian dan masyarakat.

Briptu Eko menuturkan gagasan Koling bermula dari hasil pengamatan di lapangan yang menunjukkan warga memiliki kultur yang menyukai kopi.



“Melalui Koling kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, kita rangkul agar bersama masyarakat bisa bersama-sama menciptakan suasana harmonis. Hasil kegiatan ini setiap hari kita laporan kepada pimpinan,”

“Melalui Koling kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, kita rangkul agar bersama masyarakat bisa bersama-sama menciptakan suasana harmonis. Hasil kegiatan ini setiap hari kita laporan kepada pimpinan,” tutur Briptu Eko.

Kalau biasanya ngopi jadi ajang curhat hati ke teman, bagi Satbinmas Polres Lingga, ngopi bareng bisa jadi ajang membangun kepercayaan publik pada kepolisian. Melalui program ini, Polres Lingga membuktikan bahwa polisi bukan cuma aparat berseragam, tapi juga kawan ngobrol yang siap mendengarkan.

Melalui pendekatan tersebut, warga diajak berbicara terkait berbagai isu, mulai dari aspirasi, keluhan, maupun informasi penting yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Program yang baru berjalan pada awal April ini disambut hangat oleh warga sekitar. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang rela meluangkan waktunya untuk menikmati secangkir kopi sambil

duduk berdiskusi dengan para personel Satbinmas Polres Lingga..

Warga merasa lebih dekat dengan institusi kepolisian dan lebih leluasa menyampaikan persoalan di lingkungan mereka, mulai dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga isu sosial lainnya.

Membangun Sinergi

Kapolres Lingga AKBP Pahala Martua Nababan, melalui Kasat Binmas AKP Sri Budianto, menekankan bahwa Koling bukan sekadar program sosial semata. Namun menjadi upaya strategis untuk mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat.

“Kegiatan ini adalah bukti nyata kehadiran Polri, khususnya Polres Lingga, di tengah-tengah masyarakat. Melalui pendekatan dari rumah ke rumah dan forum-forum kecil di lingkungan warga, kami ingin membangun sinergi untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan berkelanjutan,” kata AKP Sri Budianto.





Dalam pelaksanaannya, personel Satbinmas Polres Lingga tidak hanya mendengar warga. Personel juga berperan aktif untuk memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, warga juga diajak untuk lebih proaktif melaporkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Inovasi Koling dirancang agar Polri lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa suara warga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kamtibmas di wilayah Lingga," tambah AKP Sri Budianto.

Melalui program Koling yang baru berjalan ini, Satbinmas Polres Lingga berharap tercipta komunikasi yang aktif, terbuka, dan produktif sebagai fondasi kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warga Kabupaten Lingga. [*]

Analisis Kritis:

Di Balik Penembakan Polisi oleh Oknum TNI

Agung Asmara,

Mhs. Program Doktoral STIK-PTIK

Jl. Tirtayasa Raya 6, Jakarta Selatan



Analisis Mendalam:

Akar Struktural Konflik TNI-Polri
Pemisahan TNI-Polri pada tahun 2000 melalui Tap MPR No. VI dan VII/2000 menjadi tonggak reformasi sektor keamanan yang hingga kini belum tuntas. Transisi institusional yang dilakukan bersifat struktural-organisasional semata, tanpa perubahan mendasar pada kultur institusi. Kedua lembaga masih membawa "DNA dwifungsi" era sebelumnya dalam bentuk yang berbeda. Kondisi ini diperparah dengan kontestasi pengaruh dan sumber daya yang terwujud dalam perebutan ranah ekonomi-politik di daerah, ketimpangan akses anggaran, serta kompetisi pengaruh di masyarakat yang semakin mempertajam patologi birokrasi keamanan.

Rivalitas institusional TNI-Polri tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sejarah panjang. Sebelum reformasi, posisi

Polri yang berada di bawah ABRI menciptakan relasi "senior-junior" yang masih membayangi interaksi di lapangan hingga kini. Pasca-pemisahan, muncul upaya pembuktian eksistensi dan perebutan wilayah kerja yang memperburuk hubungan kedua institusi. Manifestasi rivalitas ini hadir dalam bentuk penolakan koordinasi, sikap defensif pada wilayah kerja beririsan, kecenderungan saling menjatuhkan di mata publik, serta perebutan wewenang dalam penanganan kasus-kasus tertentu yang menjadi arena kontestasi kekuasaan institusional.

Ego sektoral dalam pelaksanaan tugas mewujud dalam resistensi terhadap kolaborasi dan sikap teritorialisme yang mengakar. Keengganannya berkoordinasi dalam operasi gabungan, sulitnya membangun sistem komando terpadu, dan kecenderungan mengklaim keberhasilan secara sepihak menjadi pola yang

konsisten dalam hubungan kedua institusi. Lebih jauh, pengembangan sistem teritorial yang tumpang tindih antara Koramil dan Polsek, kompetisi dalam pengamanan objek vital, serta persaingan membangun jaringan informan di masyarakat semakin menegaskan bahwa ego sektoral telah menjadi hambatan fundamental dalam menciptakan sinergitas keamanan yang efektif.

Reformasi sektor keamanan yang setengah hati belum menyentuh aspek-aspek fundamental seperti transformasi budaya organisasi, kesejahteraan aparatur, dan demokratisasi internal. Minimnya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam pendidikan aparatur, sistem remunerasi yang tidak memadai sehingga mendorong praktik "ekonomi bayangan", serta lemahnya mekanisme checks and balances di internal institusi menjadi akar permasalahan yang belum terselesaikan. Kasus penembakan di

arena sabung ayam adalah manifestasi nyata dari kegagalan reformasi ini, di mana oknum dari kedua institusi masih terjebak dalam kontestasi "mengamankan" aktivitas ilegal demi keuntungan pribadi, bukan bekerja sama menegakkan hukum sebagaimana mandat konstitusional mereka.

Ekonomi Politik Perjudian di Daerah: Analisis Komprehensif

Praktik sabung ayam di Indonesia, khususnya di daerah seperti Lampung, telah berkembang jauh melampaui dimensi kultural menjadi kompleks jaringan ekonomi informal yang sistematis. Arena judi ini beroperasi melalui mekanisme patronase yang melibatkan elite lokal, pengusaha, dan oknum aparat keamanan dalam struktur hierarkis. Bandar judi besar menjalin relasi dengan

pemimpin informal dan formal untuk memperoleh perlindungan, sementara birokrasi keamanan hadir sebagai "pengaman" dengan imbalan setoran rutin. Sistem ini membentuk simbiosis mutualisme di mana para elit mendapatkan dukungan politik dan finansial, sementara penyelenggara judi mendapat jaminan keberlangsungan operasi. Praktik ini bertahan karena memanfaatkan celah antara hukum formal dan informal, serta mengeksplorasi ketidakhadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Rantai keuntungan yang tercipta dari praktik pengamanan ilegal sabung ayam melibatkan distribusi pendapatan secara berjenjang dalam institusi keamanan. Oknum aparat di tingkat terbawah seperti anggota Babinsa/Babinkamtibmas menerima "uang keamanan" langsung dari penyelenggara judi yang kemudian disetorkan ke atas dengan persentase tertentu hingga tingkat komando menengah. Proses ini membentuk ekonomi bayangan yang terstruktur dengan "tarif" pengamanan yang relatif tetap dan terjadwal. Menariknya, sistem ini menciptakan dependensi ekonomi di mana oknum aparat menjadikan pendapatan tidak resmi ini sebagai sumber penghasilan tambahan yang signifikan, bahkan terkadang melebihi gaji resmi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal dan normalisasi praktik "pengamanan" sebagai bagian dari budaya organisasi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam institusi keamanan.

Sabung ayam menjadi arena kontestasi kekuasaan informal yang merefleksikan dinamika politik lokal. Kemampuan mengontrol dan "mengamankan" praktik judi ini menjadi penanda pengaruh dan kekuasaan di tingkat lokal. Kompetisi antara oknum TNI dan Polri dalam "mengamankan" arena judi adalah manifestasi dari perebutan dominasi teritorial dan ekonomi. Di banyak daerah, garis demarkasi kewenangan "pengamanan" antara kedua institusi sering kali kabur dan diperebutkan, menciptakan ketegangan institusional yang berpotensi meledak menjadi konflik terbuka seperti yang terjadi di Way Kanan. Arena judi menjadi mikrokosmos sistem kekuasaan informal di mana kapital sosial, ekonomi, dan politik dipertukarkan, menciptakan jaringan kepentingan yang menghubungkan aparat keamanan, elite politik lokal, dan aktor-aktor ekonomi dalam konfigurasi kekuasaan yang kompleks.

Keterlibatan oknum TNI dalam "pengamanan" sabung ayam mengindikasikan transformasi praktik ini dari sekadar penyimpangan individual menjadi sistem yang terstruktur dan mengakar dalam kelembagaan. Pengamanan ilegal telah mengalami institusionalisasi informal di mana praktik ini ditoleransi, bahkan difasilitasi, melalui mekanisme tidak tertulis dalam organisasi. Tindakan oknum TNI dalam kasus penembakan di Lampung menunjukkan keyakinan akan "hak teritorial" terhadap arena judi yang dianggap sebagai "wilayah kekuasaan" mereka, yang kemudian diintervensi oleh pihak kepolisian. Fenomena ini mencerminkan kegagalan reformasi sektor keamanan dalam menghapus praktik ekonomi bayangan dan menunjukkan betapa mengakarnya sistem pengamanan ilegal dalam kultur institusional. Transformasi praktik pengamanan ilegal dari tindakan diskresioner menjadi sistem yang terstruktur inilah yang menjadi tantangan fundamental dalam upaya pemberantasan korupsi dan reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Krisis Profesionalisme dalam Konflik TNI-Polri

Degradasi nilai-nilai institusional dalam kasus penembakan di arena sabung ayam merupakan manifestasi nyata dari dekadensi moral yang menjangkiti sebagian aparat keamanan. Kode etik profesi dan nilai-nilai

institusional seperti pengabdian kepada masyarakat, penegakan hukum, dan netralitas telah tereduksi menjadi sekadar formalitas yang tidak terinternalisasi dalam tindakan nyata. Fenomena ini terlihat jelas dari keterlibatan oknum dalam praktik-praktik ilegal yang bertentangan dengan sumpah jabatan mereka. Paradigma "tugas sebagai beban" telah mengantikan

"tugas sebagai kehormatan", menciptakan situasi di mana kepentingan pribadi diutamakan di atas kewajiban institusional. Pragmatisme ekonomi menjadi pendorong utama di mana aktivitas pengamanan judi dianggap sebagai hak prerogatif untuk menambah penghasilan, bukan sebagai pelanggaran terhadap integritas institusi. Degradasi ini juga terlihat dari kecenderungan oknum aparat memandang kewenangan mereka sebagai "hak istimewa" yang dapat dieksplorasi untuk keuntungan pribadi, bukan sebagai amanah untuk melindungi masyarakat.

Lemahnya sistem pengawasan internal menjadi faktor krusial dalam melanggengkan praktik penyimpangan di kalangan aparat keamanan. Mekanisme pengawasan yang ada cenderung bersifat formal-prosedural, tidak mampu menjangkau pola perilaku dan jaringan "ekonomi bayangan" yang terbangun di tingkat lapangan. Audit dan evaluasi internal sering berfokus pada aspek administratif, sementara pengawasan terhadap integritas personal dan perilaku di luar tugas formal relatif minimal. Kultur "tutup mulut" dan solidaritas yang salah arah menciptakan dinding tebal yang menghalangi efektivitas whistleblowing dan pelaporan pelanggaran. Ketidakmampuan institusi mendeteksi dan mencegah keterlibatan anggotanya dalam praktik illegal protection mengindikasikan adanya "blind spot" dalam radar pengawasan atau, yang lebih mengkhawatirkan, adanya toleransi sistemik terhadap praktik-praktik tersebut. Fenomena "pengamanan" sabung ayam yang berlangsung secara terstruktur dan berkala seharusnya dapat terdeteksi melalui mekanisme intelijen internal dan pengawasan melekat, namun fakta menunjukkan sebaliknya.

Krisis kepemimpinan terlihat jelas dari ketidakmampuan atasan langsung dalam mengendalikan dan mengarahkan perilaku anggotanya

sesuai dengan nilai-nilai institusional. Kepemimpinan yang efektif seharusnya mampu menanamkan disiplin, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan sekadar memberikan perintah operasional. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa komandan unit tidak hanya gagal mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas ilegal, tetapi mungkin juga terlibat dalam rantai distribusi "penghasilan tambahan" dari praktik pengamanan tersebut. Model kepemimpinan transaksional yang menekankan loyalitas personal di atas kepatuhan terhadap nilai institusional telah menciptakan ruang bagi berkembangnya praktik-praktik menyimpang. Ketidakmampuan membangun komunikasi efektif dengan bawahan, absennya keteladanan, serta minimnya pembinaan mental dan ideologi menjadi faktor yang memperburuk situasi. Krisis kepemimpinan ini juga tercermin dari kegagalan menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di tingkat unit terkecil, di mana perilaku menyimpang seharusnya dapat terdeteksi dan dikoreksi sejak dini.

Krisis profesionalisme yang termanifestasi dalam kasus penembakan di arena sabung ayam menunjukkan konsekuensi fatal dari akumulasi kegagalan sistemik dalam reformasi sektor keamanan. Degradasi nilai-nilai institusional, lemahnya pengawasan, dan krisis kepemimpinan telah menciptakan kondisi di mana penyimpangan tidak hanya ditoleransi tetapi bahkan menjadi bagian dari "normalitas baru" dalam kultur institusi. Keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam arena judi illegal dan konflik terbuka yang berujung pada penembakan menunjukkan bahwa krisis profesionalisme telah mencapai tahap kritis yang membutuhkan intervensi mendalam. Dimensi krisis ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum terhadap pelaku penembakan, melainkan membutuhkan transformasi menyeluruh terhadap aspek-aspek fundamental yang telah disebutkan. Tanpa upaya sistemik untuk mengatasi akar permasalahan, kasus-kasus serupa berpotensi terulang dalam bentuk dan konteks yang berbeda, menciptakan lingkaran setan yang semakin menggerogoti kredibilitas institusi keamanan di mata publik.

Implikasi Sosial dan Keamanan dari Konflik TNI-Polri

Erosi kepercayaan publik terhadap institusi keamanan merupakan konsekuensi paling nyata dari kasus penembakan di arena sabung ayam. Masyarakat yang seharusnya dilindungi justru menyaksikan aparat keamanannya terlibat dalam praktik ilegal dan konflik berdarah. Insiden ini menegaskan persepsi bahwa institusi keamanan gagal menjaga integritas internal mereka, apalagi menjamin keamanan publik. Erosi kepercayaan ini berdampak sistemik terhadap efektivitas penegakan hukum, karena legitimasi aparat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan ini, program-program keamanan yang membutuhkan partisipasi publik akan sulit terlaksana, menciptakan jarak sosial antara institusi keamanan dan masyarakat. Paradoks ini semakin diperparah dengan minimnya transparansi penanganan kasus, di mana proses hukum sering terhambat oleh solidaritas kelembagaan yang salah arah, memunculkan skeptisme publik bahwa keadilan sebenarnya tidak pernah menjadi prioritas.

Persepsi impunitas bagi aparat yang melanggar hukum terbentuk dari pola penanganan kasus serupa di masa lalu yang cenderung protektif terhadap institusi. Masyarakat melihat bahwa aparat keamanan yang melanggar hukum seringkali mendapatkan "perlakuan khusus" dalam proses peradilan, baik melalui jalur internal maupun peradilan umum. Impunitas yang dipersepsikan ini melahirkan kesenjangan keadilan yang dramatis di mata publik: sementara warga sipil dihadapkan pada ketegasan hukum, aparat seolah menikmati perlindungan institusional. Dampak sosial yang muncul adalah normalisasi ketidakadilan sebagai bagian dari sistem, menimbulkan resistensi terhadap otoritas dan melemahkan kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Persepsi ini juga menciptakan preseden berbahaya dalam institusi keamanan sendiri, di mana anggota dapat melihat pelanggaran hukum sebagai risiko yang "terkelola" dengan konsekuensi minimal, berpotensi mendorong perilaku serupa di masa depan.

Trauma kolektif dalam hubungan antar-institusi keamanan merupakan implikasi jangka panjang yang paling mengkhawatirkan. Penembakan

antar-aparat menciptakan luka psikologis mendalam yang berpotensi mempengaruhi hubungan kerja TNI-Polri selama bertahun-tahun. Sentimen ketidakpercayaan dan kewaspadaan berlebih dapat mengkristal menjadi sikap institusional yang menghambat koordinasi efektif, bahkan dalam situasi darurat yang membutuhkan respons terpadu. Di level personal, trauma ini dapat mengarah pada perilaku defensif dan antagonistik ketika berinteraksi dengan institusi lain, memperburuk polarisasi yang sudah ada. Dalam konteks operasional, trauma kolektif ini berpotensi merusak jaringan komunikasi informal yang seringkali menjadi tulang punggung efektivitas operasi gabungan. Efek "spillover" dari ketegangan institusional ini juga dapat merambat ke tingkat kebijakan nasional, mempengaruhi formulasi strategi keamanan dan alokasi sumber daya, serta menciptakan lingkungan yang kontraproduktif bagi reformasi sektor keamanan yang komprehensif.

Solusi Transformatif: Pendekatan Sistemik untuk Penyelesaian Konflik TNI-Polri

1. Reformulasi Doktrin TNI-Polri yang Menekankan Sinergitas

Reformulasi doktrin merupakan langkah fundamental untuk merestrukturisasi hubungan TNI-Polri pada tataran konseptual. Kerangka doktrinal baru harus menggeser paradigma dari "pemisahan kaku" menjadi "diferensiasi sinergis" yang mengakui adanya wilayah abu-abu dalam pembagian tugas namun menetapkan mekanisme koordinasi yang jelas. Doktrin ini perlu mengandung prinsip-prinsip operasional konkret seperti komando terpadu dalam operasi gabungan, protokol eskalasi

konflik, dan mekanisme konsultasi rutin. Pada aspek implementasi, reformulasi ini menuntut perubahan kurikulum pendidikan di Akademi Militer dan Akademi Kepolisian, pelatihan gabungan secara berkala, serta evaluasi bersama untuk meningkatkan kesadaran tentang peran komplementer kedua institusi. Tantangan utama dalam reformulasi doktrin adalah mengatasi resistensi dari kalangan purna aparat yang masih mempertahankan cara pandang lama dan kepentingan tertentu, sehingga diperlukan komitmen



politik tingkat tinggi serta keterlibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam proses perumusannya.

2. Audit Institusional terhadap Praktik Pengamanan Aktivitas Ilegal

Audit institusional merupakan mekanisme diagnostik komprehensif untuk membongkar praktik pengamanan ilegal yang telah menjadi "institusi informal" dalam tubuh TNI-Polri. Berbeda dengan investigasi konvensional yang berfokus pada insiden spesifik, audit institusional meneliti pola sistemik, jaringan patronase, dan mekanisme redistribusi hasil "pengamanan" ilegal. Metodologi audit ini mencakup analisis transaksi finansial mencurigakan, penelusuran gaya hidup pejabat, pemetaan jaringan ekonomi bayangan, dan identifikasi "area rawan" berdasarkan pola rotasi personel. Untuk memastikan efektivitas, audit harus dilakukan oleh tim independen dengan mandat khusus yang dilindungi undang-undang, terdiri dari gabungan auditor internal, eksternal, dan pengawas independen. Agar berdampak sistemik, hasil audit harus ditindaklanjuti dengan reformasi struktural, penguatan mekanisme kontrol, dan pembenahan sistem remunerasi untuk mengurangi insentif

ekonomi bagi praktik-praktik ilegal. Tantangan utama dalam implementasi audit adalah memastikan independensi proses dan mengatasi "wall of silence" dalam kultur militer dan kepolisian.

3. Transformasi Budaya Organisasi yang Mengedepankan Integritas

Transformasi budaya organisasi merupakan dimensi krusial yang menyangkai perubahan nilai, sikap, dan perilaku dalam institusi TNI-Polri. Proses ini harus dimulai dari rekonstruksi identitas institusional yang berasal dari "aparat yang berkuasa" menjadi "pelayan yang profesional". Sistem pendidikan dan pelatihan perlu direformasi untuk menanamkan nilai-nilai demokratis, etika profesional, dan penghormatan terhadap supremasi hukum sebagai fondasi identitas institusional. Program mentoring berbasis nilai perlu dikembangkan untuk memfasilitasi internalisasi standar etika pada semua tingkatan kepangkatan. Sistem penghargaan dan promosi harus direorientasi untuk memprioritaskan integritas di atas prestasi operasional semata. Kepemimpinan transformatif yang menjadi role model integritas harus dipromosikan melalui mekanisme seleksi yang ketat. Mengubah budaya organisasi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kepemimpinan dan resistensi terhadap tekanan politik, dengan tantangan utama berupa kuatnya kultur "old boys network" dan normalisasi praktik-praktik menyimpang yang telah bertahun-tahun mengakar.

4. Transparansi Hukuman terhadap Pelaku untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

Transparansi hukuman merupakan elemen vital untuk memulihkan kepercayaan publik yang tererosi akibat persepsi impunitas. Proses hukum terhadap oknum yang terlibat dalam kasus penembakan dan praktik pengamanan ilegal harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan tanpa intervensi institusional. Mekanisme peradilan khusus yang melibatkan panel hakim independen dapat dipertimbangkan untuk menghindari bias institusional. Informasi mengenai proses peradilan, termasuk pertimbangan hukum dan sanksi yang dijatuhan, harus

dikomunikasikan secara proaktif kepada publik. Prinsip "no impunity" harus diterapkan secara konsisten, memastikan bahwa pangkat dan posisi tidak menjadi faktor perlindungan. Transparansi hukuman juga mencakup pengakuan institusional atas kegagalan sistemik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, menunjukkan komitmen untuk perubahan. Tantangan dalam implementasi transparansi hukuman adalah mengatasi kecenderungan institusi untuk melindungi anggotanya dan mencegah "politisasi" kasus yang dapat mendistorsi proses hukum, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara keterbukaan dan integritas proses peradilan.

5. Penguatan Mekanisme Pengawasan Sipil terhadap Institusi Keamanan

Pengawasan sipil merupakan jaminan struktural untuk keberlanjutan reformasi sektor keamanan dan pencegahan penyimpangan di masa depan. Komisi pengawas independen dengan kewenangan investigasi yang kuat perlu dibentuk atau diperkuat, dengan anggota yang memiliki integritas dan keahlian relevan. Parlemen harus mengambil peran lebih aktif dalam fungsi pengawasan, termasuk melalui dengar pendapat publik, evaluasi anggaran berbasis kinerja, dan pemantauan implementasi kebijakan keamanan. Organisasi masyarakat sipil perlu difasilitasi untuk terlibat dalam dialog konstruktif dengan institusi keamanan, menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif. Media independen yang kritis namun bertanggung jawab berperan penting dalam menciptakan tekanan publik bagi akuntabilitas institusional. Untuk menjamin efektivitas pengawasan sipil, diperlukan reformasi undang-undang yang memperkuat mandat lembaga pengawas, melindungi whistleblower, dan menjamin akses informasi publik. Tantangan utama adalah mengatasi resistensi institusional terhadap "intervensi" sipil dan memastikan bahwa lembaga pengawas itu sendiri tidak terkooptasi oleh kepentingan politik atau dilemahkan melalui keterbatasan sumber daya.

(Isi tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili sikap Redaksi Majalah TBNews.)

Cegah Penyelundupan Senjata,

Polri Usulkan Rekomendasi Konkret



Penyelundupan senjata masih menjadi masalah di ASEAN, khususnya di wilayah pascakonflik. Sifat lintas batas ASEAN membuat perdagangan gelap sulit dihentikan,

Mewakili Indonesia, delegasi Polri mendorong upaya harmonisasi regulasi dan sistem pelaporan terpadu dalam pertemuan Ke-7 ASEAN SOMTC Working Group on Arms Smuggling (WG on AS) di Sihanoukville, Kamboja, 8 April 2025.

Pertemuan tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat kerja sama regional dalam menangani penyelundupan senjata api di kawasan Asia Tenggara. Dialog menghadirkan perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, organisasi internasional seperti UNRCPD dan NSEA, serta Timor Leste sebagai pengamat.





Dipimpin Kadivhubinter Polri Irjen Pol Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., dalam pertemuan tersebut Polri menyampaikan rekomendasi konkret yang bisa diadopsi untuk memperkuat efektivitas penanggulangan penyelundupan senjata.

"Penyelundupan senjata di kawasan ASEAN adalah isu lintas batas yang kompleks. Kita dihadapkan pada tantangan geografis dan jalur perbatasan yang beragam, sehingga kerja sama antarnegara menjadi mutlak," kata Irjen Krishna Murti.

Beberapa langkah penting yang diusulkan antara lain pertukaran informasi intelijen yang lebih cepat dan akurat antar aparat penegak hukum ASEAN dan harmonisasi regulasi senjata api di negara anggota.

Delegasi Indonesia juga mengusulkan pengawasan ketat terhadap penjualan dan distribusi senjata, baik secara legal maupun ilegal. Selain itu, Polri juga mengusulkan pemanfaatan BTNCLO (Border Tactical Network Command Liaison Officer) yang sudah berjalan di 13 Polda perbatasan sebagai sistem pelaporan terpusat untuk memberantas penyelundupan.

"Penguatan pengawasan perbatasan serta pengendalian distribusi senjata menjadi kunci utama. Indonesia juga mendukung penyusunan strategi jangka panjang untuk menghadapi tantangan ini secara kolektif," kata Irjen Krishna Murti menambahkan.



Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) merupakan pertemuan pejabat senior kepolisian di ASEAN dan mitra dialog untuk membicarakan kerja sama pemberantasan dan penegakan hukum dalam kasus kejahatan antar negara.

Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan awal untuk menyusun draft Arms Smuggling Component of the Work Programme 2026–2028, yang

akan menjadi acuan kolaborasi regional di masa mendatang. Hasil dan rekomendasi pertemuan akan dibawa ke SOMTC ke-25 yang akan digelar pada 23–27 Juni 2025 di Putra Jaya, Malaysia.

Selanjutnya, akan diajukan untuk diadopsi dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-19 pada 8–12 September 2025 di Malaka, Malaysia, yang dihadiri langsung oleh Kapolri sebagai



AMMTC Leader dari Indonesia.

Pertemuan Ke-7 ASEAN SOMTC Working Group on Arms Smuggling (WG on AS) menegaskan kembali komitmen kuat ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan senjata, yang tidak hanya mengancam stabilitas keamanan negara, tetapi juga berpotensi digunakan oleh kelompok kriminal maupun teroris.

Diharapkan dengan kerja sama yang erat dan strategi kolektif



yang terkoordinasi, diharapkan kawasan ASEAN dapat semakin kuat dalam menghadapi ancaman penyelundupan senjata dan menjaga perdamaian serta ketertiban regional.

Peran Penting

Indonesia memainkan peranan penting dalam memimpin upaya-upaya penanggulangan kejahatan transnasional atau lintas negara di Kawasan. Peranan ini mengemuka dan meninggalkan catatan keberhasilan Indonesia dalam mendorong upaya yang lebih intensif untuk memerangi kejahatan transnasional dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi.

Kawasan Asia Tenggara memiliki tantangan tersendiri dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan senjata dikarenakan beberapa hal seperti kondisi geografis perbatasan darat dan maritim yang berbeda antar Negara Anggota ASEAN dapat digunakan sebagai jalur utama dalam penyelundupan senjata lintas negara di kawasan dan adanya kesenjangan kemampuan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyelundupan senjata di kawasan.

Penyelundupan senjata masih menjadi masalah yang meluas di ASEAN, khususnya di wilayah pascakonflik. Sifat lintas batas ASEAN membuat perdagangan gelap sulit dihentikan, termasuk penyelundupan senjata api dan amunisinya di wilayah tersebut. Penyelundupan senjata merupakan tantangan bagi pembangunan sosial-ekonomi dan politik Negara Anggota ASEAN.

Penyelundupan senjata secara signifikan meningkatkan potensi kekerasan oleh berbagai aktor non-negara mulai dari separatis, sindikat kejahatan, teroris, dan bandar narkoba hingga bajak laut. Akibatnya, hal ini menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.



Sejauh ini terdapat banyak titik panas pertikaian di seluruh Asia Tenggara antara lain Myanmar, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Papua Barat di Indonesia

Tantangan Domestik

Secara geografis, Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.290 km menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan aparat keamanan karena merupakan akses penyelundupan.

Garis pantai yang begitu panjang di kawasan Asia Tenggara memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan illegal yang digunakan untuk penyelundupan

Titik rawan penyelundupan senjata di Indonesia terletak pada wilayah perbatasan laut antara Sulawesi Utara dengan Filipina bagian Selatan yang dihuni beberapa kelompok bersenjata dan kriminal terorganisir. Wilayah ini juga memiliki sejumlah home industri yang bergerak dalam bidang produksi senjata api rakitan semenjak era Perang Dunia II.

Kondisi ini makin sulit karena terdapat sekitar dua juta senjata tidak terdaftar yang beredar di Filipina. Kelompok teroris Indonesia sering melakukan pembelian senjata melalui jalur ini untuk mendapatkan senjata dari Filipina bagian Selatan.

Di sisi lain, meluasnya perang sipil di Myanmar juga memperparah arus perdagangan senjata gelap di Asia Tenggara. Melalui jalur yang sudah mapan di titik-titik konflik itulah, sejumlah senjata api dan amunisinya dapat mengalir pula ke Indonesia dan diakses oleh kelompok-kelompok bersenjata di Indonesia.

Sejauh ini terdapat banyak titik panas pertikaian di seluruh Asia Tenggara antara lain Myanmar, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Papua Barat di Indonesia. Kelompok-kelompok bersenjata ini kerap kali menjadikan penyelundupan senjata api illegal sebagai sumber pemasukan operasional mereka.

Dengan sejumlah kelompok bersenjata seperti JAD (ISIS), JAT (Al-Qaeda), MIT (ISIS), dan OPM. Ini menandakan adanya pasar bagi senjata api illegal yang kemudian semakin menarik perhatian pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelundupan. Inilah yang kemudian memicu siklus ekonomi jahat melalui perdagangan senjata hasil dari penyelundupan membiayai operasional kelompok bersenjata. [*]



#RISEANDSPEAK: JANGAN TAKUT BERSUARA

Kampanye #RiseAndSpeak tidak hanya mencakup edukasi melalui media sosial dan media konvensional, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan langsung di masyarakat.

Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA/PPO) Bareskrim Polri menggelar kampanye edukatif di Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, Kamis, 6 Februari 2025.

Lewat program bertajuk **#RiseAndSpeak: Berani Bicara Selamatkan Sesama**, mereka mengajak para santri untuk tidak

ragu melaporkan kekerasan seksual di lingkungan mereka.

Direktur Tindak Pidana PPA/PPO Brigadir Jenderal Nurul Azizah memimpin langsung kegiatan tersebut. Di hadapan ratusan santri, ia menyerukan pentingnya keberanian dalam bersuara. "Santriwan dan santriwati harus berani berbicara. Jika mengalami atau mengetahui kekerasan seksual, jangan diam," kata Nurul.



Kampanye #RiseAndSpeak tidak hanya mencakup edukasi melalui media sosial dan media konvensional, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan langsung di masyarakat, seperti workshop, konsultasi dengan psikolog, pemberdayaan masyarakat, serta kompetisi dan penghargaan bagi institusi yang menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) terbaik, penyidik terbaik, inovasi terbaik, dan penghargaan lomba He For She.

Program sosialisasi ini menasarkan kalangan santri karena pesantren dinilai sebagai lingkungan yang rawan terjadi kekerasan terselubung akibat struktur otoritatif yang tertutup. Para santri diberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual-baik fisik maupun non-fisik-serta hak perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS.

Selain materi edukasi, tim dari Bareskrim juga memperkenalkan jalur pelaporan resmi seperti call center 110, Layanan SAPA 129, dan TePSA 1500771 yang dapat diakses oleh korban maupun saksi.

Kapolresta Cirebon, Komisaris Besar Sumarni, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya peran kolektif dalam pencegahan. "Pesantren adalah tempat pembentukan karakter. Maka harus menjadi zona aman bagi santri," ujarnya.

Kampanye #RiseAndSpeak mendapatkan sambutan positif dari para santri. Mereka mengikuti sesi interaktif dan berpartisipasi dalam pembacaan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang saling melindungi. Doa bersama menutup kegiatan tersebut.

Nurul berharap kegiatan serupa bisa dilakukan secara berkelanjutan di berbagai pesantren di Indonesia. "Kami ingin membentuk generasi santri yang cerdas, berakhlik, dan berani menolak kekerasan," ujarnya.



Fenomena Gunung Es

Kasus kekerasan seksual di pesantren bukanlah hal baru. Pada 2021, publik dikejutkan oleh kasus HW, seorang guru pesantren di Bandung, yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati sejak 2016. Komnas Perempuan menyebut kasus ini sebagai bagian dari fenomena gunung es kekerasan seksual

di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama.

Data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2024, terdapat 101 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di pondok pesantren. Dari jumlah tersebut, 69 persen adalah anak laki-laki dan 31 persen anak perempuan.





Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan signifikan dalam kasus kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Pada 2024, tercatat 573 kasus kekerasan, meningkat lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menanggapi maraknya kasus kekerasan di pesantren,

Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kemenag. Selain itu, Keputusan Menteri Agama No. 83 Tahun 2023 juga dikeluarkan sebagai pedoman dalam penanganan kekerasan seksual.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono Abdul Ghofur, menekankan pentingnya keterbukaan dari pengurus pesantren dalam menyiapkan persoalan hukum. "Kita-masyarakat harus terbuka. Serapap apa pun persoalan ditutupi, pada saatnya akan terungkap," ujarnya.

Tak hanya itu, Kementerian Agama juga meluncurkan regulasi pengasuhan ramah anak di pesantren melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor 1262 Tahun 2024. Regulasi tersebut merupakan petunjuk teknis yang disusun bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), para pengasuh pesantren, akademisi, dan praktisi anak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual di pesantren. "Kami mengusulkan program 'Pesantren Ramah Anak' sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan," ujarnya.

Dengan adanya kampanye seperti #RiseAndSpeak, diharapkan para santri semakin sadar akan hak-hak mereka dan berani melaporkan jika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. [*]





Mengantongi perintah misi bersandi operasi A basis Z berupa Skep Menteri Panglima Kepolisian No. Po:1827/SC/IV/M/ Pangak tertanggal 5 Desember 1964, 96 personel Kompi D/ Yon 32 Pelopor itu diam-diam menyusup Malaysia.

Di pimpin Iptu Nicholas A. Titaley mereka membagi kompi menjadi beberapa tim dan menyelinap melalui pulau-pulau yang tersebar di Kepulauan Riau. Seluruh tim berencana bertemu di Gunung Belumut, yang terletak di Johor.

Di antara yang berhasil mendarat di negeri jiran itu adalah Tim 3 Peleton IV yang dipimpin Brigadir Polisi Jacobus Taboki Takuda pada 20 Maret 1965 setelah sebelumnya terlibat kontak senjata sengit dengan unit-unit Special Air Services (SAS) Inggris.

Sepekan kemudian, mereka mengumpulkan logistik di Kampung Masahi, Koto Tinggi, Johor, Malaysia dan melanjutkan perjalanan menggunakan truk menuju Gunung Belumut. Rupanya perjalanan itu terdeteksi patroli udara tentara Inggris yang memantau menggunakan helikopter.

Sadar keberadaannya terdeteksi oleh lawan, Taboki memerintahkan unit-unitnya turun dari truk dan mengubah pergerakan dengan berjalan kaki. Dua hari perjalanan menuju Gunung Belumut pada tanggal 3 April 1965 tim kecil beranggota 11 orang itu disergap musuh dengan gempuran tembakan dari segala penjuru.

Ranger Mobrig, MENJAGA NEGARA BERSABUNG NYAWA

Beperan sebagai light infantry, Ranger Mobrig mampu bergerak cepat, beradaptasi di berbagai medan serta sanggup dikerahkan untuk berbagai misi seperti pengintaian, penyerangan hingga pertempuran dalam skala kecil.





■ Anton Soedjarwo mantan Komandan Kompi Ranger yang menjadi Kapolri



Tak cukup pasukan darat, musuh juga menggunakan bantuan udara untuk menyulitkan kedudukan tim pimpinan Taboki. Di hutan Samgong Kota Tinggi itulah perjalanan tim itu terhenti. Taboki gugur bersama 7 anggota Tim Ranger Pelopor yang dipimpinnya. Mayatnya dibiarkan membusuk sampai tiga hari baru kemudian dikuburkan. Taboki dan anak buahnya tidak pernah kembali dan raganya terkubur di Kota Tinggi Malaya.

Kisah yang nyaris serupa juga dialami Tim 3 Peleton III Kompi Pelopor yang dipimpin Brigadir Suyatmin dan tim pimpinan Aipda Amji Atak yang gugur di laut setelah baku tembak dengan dua frigat Inggris.

Ranger Mobrig

Teruji nyaris di semua front pertempuran selama perang kemerdekaan, menjelang tahun 1950-an Mobiele Brigade (Mobrig) tampil menjadi tulang punggung utama Polri. Pada masa itu, pendidikan

Mobrig dilengkapi dasar-dasar kemiliteran dan infanteri termasuk teknik bertempur regu, peleton hingga level batalyon.

Kala itu pendidikan menjadi tamtama Mobrig memerlukan waktu 13 bulan, lebih lama dibanding pendidikan tamtama TNI AD yang hanya memerlukan waktu 4 bulan. Meskipun menghasilkan personel yang relatif lebih tangguh, konsekuensinya jumlah personel yang ada saat itu tidak cukup untuk mengatasi konflik bersenjata di daerah-daerah. Belum lagi lawan yang harus dihadapi adalah mantan pejuang berkemampuan tinggi dan kenyang pengalaman dalam perang gerilya.

Pelajaran dari pemberontakan DI/TII yang mengandalkan serangan dadakan menjadi pengalaman berharga bahwa polisi membutuhkan unit yang memiliki kemampuan mengejar musuh sekaligus melakukan serangan balasan yang menjadi taktik utama pertempuran anti gerilya. Menurut petinggi polisi, Mobrig



harus ditingkatkan kemampuannya menjadi light infantry dengan kualifikasi Ranger.

Gagasan itu baru terwujud setelah keterlibatan CIA/AS dalam pemberontakan PRRI-Peresta terbongkar. Berniat "mengambil hati" Bung Karno, AS menggelontorkan bantuan kepada Indonesia termasuk di antaranya dalam bentuk pelatihan militer.

Mobrig termasuk di antara satuan yang mendapatkan "berkah" dari aksi permintaan maaf pemerintah AS ini. Ini selaras dengan rencana Mobrig yang baru saja membentuk Sekolah Pendidikan Mobile Brigade (SPMB) di Watukosek, Porong, Jawa Timur pada 10 Juni 1955. Seluruh instruktur SPMB inilah yang kemudian mewakili Mobrig untuk dikirim ke Filipina mempelajari pembentukan pasukan Ranger.

Beberapa di antara mereka juga digembeleng Special Force dan Marinir Amerika Serikat sementara yang lainnya mendapatkan kursus infanteri lanjut di Fort Lavenworth dan Fort Bragg termasuk di antaranya adalah Inspektur Anton Soedjarwo.

Pada bulan Januari 1959, dikirim 8 perwira polisi untuk dididik di Pangkalan Marinir AS di Okinawa sementara pembentukan kompi pertama Ranger terealisasi September 1959. Tercatat, hingga akhir tahun 1959 SPMB Watukosek berhasil membentuk tiga Kompi Ranger. Ketiga Kompi Ranger itu adalah Kompi 5994 dengan Komandan Kompi AKP Loemy, Kompi 5995 dengan Komandan Kompi AKP Anton Soedjarwo dan Kompi 5996 dengan Komandan Kompi AKP Saim yang karena ditugaskan diluar negeri dijabat oleh AKP Hudaya Sumarya.

Pendidikan Ranger terakhir angkatan ke-6 berlangsung pada tahun 1961 dan setelahnya Ranger berubah nama menjadi Pelopor. Sejak tahun 1962-1968 dilangsungkan pendidikan Pelopor angkatan I – VIII. Pada 13 Maret

1961 Kompi Pelopor dikembangkan menjadi Batalyon Pelopor. Selanjutnya dikembangkan lagi menjadi Resimen Pelopor (Menpor).

Loreng Macan Tutul

Pada awal terbentuknya Ranger Mobrig ini seragam yang dipergunakan adalah baju loreng dengan motif M1942 Frogskin atau dikenal sebagai loreng "Macan Tutul". Penggunaan loreng ini masih terlihat pada tanggal 14 November 1961 pada saat penyerahan dwaja

"Nugraha Sakanti Yana Utama" dan perubahan nama Mobil Brigade (Mobrig) menjadi Brigade Mobil (Brimob).

Dilengkapi dengan senapan serbu US Carabine, di kemudian hari Ranger Mobrig dipersenjatai dengan AR 15 yang kala itu merupakan versi awal dari M 16A1. Ini membuat Ranger Mobrig menjadi salah satu unit pengguna pertama senjata ini, bahkan ketika batalyon Infanteri regular AS yang bertugas





di Vietnam sebagai observer masih menggunakan senjata M 1 Garrand.

Sebagai tindak lanjut pengembangan pasukan dengan kemampuan Ranger, Polri membuka pelatihan di Lido, Bogor, dan Watukosek. Setelah 1961, banyak anggota Brimob dengan kemampuan Ranger yang punya pengalaman tempur melawan DI/TII dan PRRI/Permesta.

Ranger itu semula hanya berada di Kompi 5994, namun dengan jumlahnya yang berkembang cepat

mencapai satu batalyon, mereka lantas dikelompokkan dalam Batalyon 1232.

Memet Tanumidjaja dalam buku *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian* menulis, dua peleton dari Kompi 5994 terlibat dalam operasi 17 Agustus memberantas PRRI di Sumatra Tengah bagian selatan.

Pasukan itu berkembang terus dan pada tahun 1961 nama Ranger diubah menjadi Resimen Pelopor. Sepanjang perjalannya, resimen

ini terlibat operasi penumpasan dan pembersihan berbagai pemberontakan, dari DI/TII Kartosuwiryo, DI/TII Daud Beureuh, PRRI, sampai operasi penumpasan DI/TII Kahar Muzakar. Resimen ini juga terlibat secara aktif dalam Operasi Mandala untuk merebut kembali Irian Barat dan Kampanye Dwikora mencegah pembentukan Federasi Malaya yang ingin menggabungkan Singapura, Brunei, Serawak, Malaya dan Sabah yang didukung oleh Inggris. [*]

Bermula dari Hobi,

Bripka Suwanto Jadi Kolektor Barang Antik

Suwanto mulai mengumpulkan barang antik sejak tahun 2007 dari hasil menyisihkan keuntungan berjualan tembakau.



Melangkah ke halaman sebuah rumah Desa Tawing, Gondang, Tulungagung nuansa Jawa tempo dulu langsung terasa. Belasan kandang kerbau, lumbung padi dan berbagai barang kuno lainnya berjejer mengisi keluasan halaman.

Sementara itu, di bagian dalam rumah penuh aneka mebel dan aksesoris kuno sejak era kolonial Belanda. Tak sekadar menjadi koleksi, bagi sang pemilik rumah ternyata barang-barang antik itu adalah komoditas bisnis yang menggiurkan.

Pemilik rumah itu adalah Bripka Suwanto, Bhabinkamtibmas Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Tulungagung. Berkat kegigihannya, hobi mengoleksi barang antik itu menjadi bisnis yang mendatangkan keuntungan besar, bahkan hingga menarik minat kolektor dari dalam dan luar negeri.

Semula, Suwanto mulai mengumpulkan benda-benda kuno dari usaha sampingannya berdagang tembakau. Sejak tahun 2007, setiap mendapat untung ia selalu menyisihkannya untuk berburu barang-barang jadul itu. Saat itu dirinya tak tahu jika barang-barang tersebut memiliki nilai. Apa saja dibeli termasuk di antaranya gledheg, lesung, bajak, lukisan lama, cikar hingga bekas bangunan kandang kerbau.

"Saya sebenarnya tidak tahu barang-barang itu punya nilai. Pokoknya asal beli saja, kemudian disimpan," cerita Suwanto mengenang.

Baru setelah berselang 10 tahun yakni pada tahun 2017, Suwanto kaget ketika tiba-tiba ada orang yang berminat membeli salah

satu koleksinya. Barang itu adalah sebuah lukisan hutan jati yang di tengahnya terdapat aliran air. Selain terlihat sangat tua lukisan itu juga sudah sobek.

Semula ia sungkan saat ada orang yang menginginkan lukisannya itu karena rusak dan tak layak jual. Ketika si pembeli ngotot, mantan personel Brimob iseng saja ketika mematok harga Rp 2 juta. "Saya kasih harga Rp 2 juta ternyata langsung dibeli tidak ditawar. Lalu ada lukisan kedua yang tidak kalah tua," ungkapnya.

Lukisan kedua yang diminati adalah sebuah lukisan nelayan yang tengah menarik jaring penuh ikan. Sama dengan yang pertama, lukisan itu kondisinya juga sudah lusuh dan bahkan pigurnya rusak. Saat



Suwanto memasang harga Rp 1,5 juta, lagi-lagi lukisan itu dibeli tanpa ditawar.

"Saya mulai serius menjual barang antik sejak 2017. Dari situ, saya berpikir, kenapa tidak saya kembangkan menjadi bisnis?" kata Suwanto.

Sejak dua kejadian itulah Suwanto menyadari bahwa hobinya tersebut bisa menjadi jalan untuk menjemput rezeki. Barang-barang kuno koleksinya ternyata memiliki peminatnya tersendiri sekaligus memiliki nilai yang tinggi.

Galeri Antik 77

Suwanto mulai aktif berburu barang-barang kuno terutama dari pedesaan. Ia bahkan memiliki tim yang bekerja bersamanya untuk berburu benda-benda kuno. Sementara di rumahnya ia

mempekerjakan enam karyawan untuk merestorasi benda-benda kuno didapatnya.

Setelah menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri, setiap hari Suwanto aktif mengiklankan koleksinya lewat Instagram, Facebook dan TikTok. Ia memberi nama koleksi benda-benda kuno miliknya Galeri Antik 77. Nama itu kini berkibar di antara penggemar barang-barang antik.

"Alhamdulillah, selama ini pemasaran melalui media sosial cukup efektif. Banyak yang tertarik, bahkan dari luar negeri," tutur Suwanto.

Berkat strategi pemasaran tersebut, pembeli koleksinya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Batam, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.





Menurut Suwanto saat ini barang yang paling banyak laku adalah kandang kerbau yang disulap untuk berbagai peruntukan. Termasuk menjadi gazebo, tempat bersantai keluarga bahkan hingga garasi mobil.

Kandang kerbau itu dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp 17 juta hingga Rp 150 juta tergantung pada ukuran, jenis kayu, serta ketebalan kayu yang digunakan. Semakin tua dan semakin besar ukurannya semakin mahal pula harga kandang itu.

Tak hanya kandang kerbau, bekas lumbung padi juga menjadi barang yang paling banyak diburu kolektor. Bangunan kayu mirip rumah kecil lengkap dengan beranda ini oleh para kolektor umumnya difungsikan sebagai tempat bersantai atau mushola.

Suwanto juga mengungkapkan bahwa perabotan antik seperti meja, kursi, dan lampu kuno menjadi barang yang laris manis. Koleksinya sejauh ini sudah terjual di sejumlah

kota besar di Indonesia hingga Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat.

Keberhasilan ekspor kandang kebo tak lepas dari tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Gamping. Desa itu dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan marmer serta berbagai produk kerajinan batu yang terkemuka di Tulungagung.

Banyak pembeli dari luar negeri yang langsung datang ke Desa Gamping, hingga akhirnya ada yang meminati koleksi Suwanto. Sejumlah kafe atau rumah makan dengan tema Jawa kuno juga mengambil barang dari Suwanto.

"Peminatnya lintas etnis, tidak hanya orang Jawa saja, orang Tionghoa juga banyak yang jadi langganan. Termasuk para bule yang sangat menghargai kekunoan," kata dia. [*]



Totalitas Membina Santri Penghafal Al-Quran

Termotivasi pahala jariyah yang terus mengalir, Aipda Gusmik memfasilitasi ratusan santri untuk jadi penghafal Al Quran.



Melewati ujian dan cobaan yang datang bertubi-tubi, siapa sangka justru membuat perjalanan hidup Aipda Gusmik menjadi penuh warna dan sarat pengalaman. Sempat didiagnosis mengalami sakit jantung hingga stroke ringan, ia justru sukses menebar berkah dengan kiprahnya di bidang keagamaan.

Tak hanya mendidik santri-santri penghafal Al-Quran, bersama keluarga besar Brimob dan masyarakat, Gusmik juga menginisiasi pembangunan masjid.

Menjalani Pendidikan Sekolah Calon Tamtama (Secata) Magetan Rindam V/ Brawijaya tahun 1996 lalu Pusdik Brimob Watukosek, Gusmik menjalani penempatan dinas di Mako Brimob Kelapa Dua di Depok. Ia juga sempat mengikuti Pendidikan "Tim Pemburu" Rajawali 4 di Pussdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Kab. Bandung, Jawa Barat.

Beragam penugasan telah dijalani Gusmik termasuk ke Timor Timur selama 18 hingga menjelang Jajak Pendapat Pemilu tahun 1999, lalu ke Ambon, dan Aceh. Terakhir, kegiatan sehari-hari Gusmik adalah bertindak sebagai pelatih di Resimen I Paspelopor Kedunghalang, Bogor.

Termotivasi dengan ceramah seorang ulama tentang "Penghafal Qur'an", Gusmik berharap di sisa usianya bisa dibimbing menjadi menghafal Al-Quran. Harapan itu akhirnya terwujud berkat bimbingan seorang ustadz dan mulai menghafal Juz 30 seperti Surah An Naba', An-Naaziat, Abasa, At-Takwir, dan surah-surah lainnya.

"Seiring berjalannya waktu kemudian ada sahabat kami seorang ustadz yang meminta

Al-Quran untuk diberikan kepada santrinya untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah waktu itu saya bisa membagikan Al-Quran sebanyak 21 buah," cerita Gusmik.

Mengabadikan kegiatannya melalui video dan mengunggahnya di internet, Gusmik banjir pertanyaan dari handai tolan dan sahabat. Tak lama kemudian, segera saja di rumahnya kiriman Al-Quran datang tak putus-putus.

"Waktu itu Al-Qur'an saya distribusikan sebanyak ada 100, ada 200, 300 bahkan selama kurang lebih hampir 4 tahun lebih ini Allah SWT telah memberi amanah sekitar 6.000-an Al-Qur'an yang sudah kami distribusikan termasuk kepada keluarga besar Brimob," lanjut Gusmik.



Beres dengan urusan distribusi Al-Quran, belakangan Gusmik termotivasi untuk memiliki santri agar memiliki pahala yang terus mengalir sebagai bekal terbaik di akhirat. Ternyata, di kesatuan ada rekan Gusmik yang istrinya merupakan guru ngaji dan menyampaikan keinginannya mempunya santri penghafal Al-Qur'an. "Saya perlu lima saja, yang penting orangnya serius. Tapi ternyata Allah datangkan kurang

lebih sekitar 36 orang santri penghafal Qur'an," pernyataan Gusmik.

Seiring berjalananya waktu dan sempat terkendala pandemi Covid-19, jumlah santri penghafal Al-Quran di Keluarga Besar Brimob terus bertambah menjadi 60 orang, 70 orang, 100 orang bahkan hingga 150 orang.

"Alhamdulillah sampai saat ini yang menghafal Qur'an di tempat kami paling tinggi kemarin bisa

hafal Qur'an sudah 6 juz lebih. Santri ini dimudahkan masuk di Sekolah Tinggi Administrasi Negara dengan mempergunakan hafalan Al-Qurannya," lanjut pernyataan Gusmik.

Membangun Masjid

Selain menyasar putra-putri Brimob di kesatuan, memanfaatkan aula kosong ia juga mencari santri dari warga kampung di sekitar rumahnya yang notabene berasal dari keluarga tidak mampu.





Memulai dari 11 orang santri berkata kabar dari mulut ke mulut jumlahnya yang mendaftar terus bertambah sampai 40 orang, kemudian 80 orang dan hingga 140-an,

"Jadi santri kami yang ada di Keluarga Besar Brimob ada kurang lebih sekitar 150 orang. Kemudian yang di tempat kami tinggal itu ada 140 orang. Jadi hampir kurang lebih sekitar 300," lanjut Gusmik.

Tak cukup dengan hanya mengajar, Gusmik juga mulai menabung untuk

membeli tanah untuk dibangun masjid. Tidak luas memang, namun niat terbukti membuka pintu rizki yang lain dengan Tuhan memberi kemudahan yakni banyaknya bantuan mengalir untuk mewujudkan masjid itu. Gusmik menamai masjid itu sebagai Masjid Al-Bir Brigade Arsy.

"Jadi berkahnya, selama ini saya berjuang bersama Keluarga Besar Brimob dan masyarakat dan orang-orang baik. Insya Allah

kebaikan ini untuk orang-orang yang terbaik yang mengamalkan Quran. Jadi masjid itu kurang lebih kepanjangannya seperti itu."

Masjid Al-Bir Brigade Arsy diresmikan tanggal 10 September 2023 dan demikian santri-santri penghafal Quran kini mempunyai tempat sendiri.

"Alhamdulillah selama 18 bulan ini Allah berikan kemudahan kelancaran. Datang orang-orang baik yang saya juga gak pernah tahu. Dibantu sama orang-orang baik bisa melaksanakan Jumat Berkah. Selama setiap jumlah berkah kita menyediakan kurang lebih sekitar 150 porsi sampai 200 porsi makanan," cerita Gusmik.

"Tahun 2025 kemarin ada Komandan kami memberikan uang untuk diwakafkan untuk membeli tanah. Dan Alhamdulillah sekarang sudah diperluas lagi, dan sedang dalam pembangunan. Ini untuk adalah tempat pesantren dan perluasan masjid. Jadi bisa dipergunakan nanti santri-santri tinggal."

Dalam prosesnya, para santri tersebut belajar tanpa dipungut biaya sepeserpun. Selain dari uang pribadi, operasional dan kebutuhan sehari-hari nyatanya bisa ditanggung dari donator. Termasuk untuk menggaji guru ngaji yang semula hanya beberapa kini sudah mencapai 15 orang guru.

Tak hanya untuk santri penghafal Quran, Masjid Al-Bir Brigade Arsy juga menjadi pusat kegiatan keagamaan termasuk untuk pengajian untuk ibu-ibu majelis taklim, program pelajaran Bahasa Arab, Bahasa Inggris, fiqh, kajian subuh, tahsin & tilawatil Quran, aqidah akhlak, tahajud berjamaah, halaqoh Al-Quran hingga santunan anak yatim. Masjid juga mengakomodasi tahfidzul Quran, tajwid, membaca Surah Yasin bersama jamaah & santri, Jumat Berkah, Sejarah Rasulullah SAW, Murojaah & Ziyadah hafalan Alquran, dan akhlak Lilbanin. [*]

Pinjam Bank Demi Wujudkan Pendidikan Anak Tidak Mampu

Bermodal uang pinjaman dari bank, Aiptu Agus Riyanto kemudian membangun tempat belajar bagi anak-anak pemulung.

Berseragam rapi polisi, seorang pria dengan ban lengan bertuliskan Bhabinkamtibmas itu nampak sibuk mengajari penjumlahan di sebuah ruang kelas sederhana yang dicat penuh warna.

Bangunan yang telah dibangun sejak empat tahun lalu itu berdiri di atas tanah perkampungan pemulung. Sekalipun bangunannya dikelilingi oleh tumpukan sampah, tak sedikitpun menjadi hambatan anak-anak pemulung meraih mimpi.

Sosok pria dibalik berdirinya bangunan tersebut ialah Aiptu Agus Riyanto, personel Polri yang berdinass di Polsek Kembangan, Polda Metro Barat.





“Saya merasa sedih karena banyak anak-anak yang membantu orang tuanya dan mereka itu tidak bersekolah. Saya menyadari mayoritas dari mereka adalah pendatang dan secara administratif mereka bukan warga DKI Jakarta. Saya yang berasal dari Purworejo sana aja sekolah, justru anak-anak yang tinggal di Jakarta ini malah tidak sekolah,”



Pria kelahiran Purworejo itu menaruh rasa prihatin setelah melihat banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak imbas dari kondisi ekonomi keluarga yang menjepit.

Anak-anak yang mayoritas merupakan pendatang di sekitar kampung pemulung tersebut kebanyakan terpaksa merelakan masa-masa sekolahnya untuk membantu orang tua bekerja.

“Saya merasa sedih karena banyak anak-anak yang membantu orang tuanya dan mereka itu tidak bersekolah. Saya menyadari mayoritas dari mereka adalah pendatang dan secara administratif mereka bukan warga DKI Jakarta. Saya yang berasal dari Purworejo sana aja sekolah, justru anak-anak yang tinggal di Jakarta ini malah tidak sekolah,” kata Aiptu Agus.

Dengan bermodalkan uang pinjaman dari bank, Aiptu Agus kemudian membangun tempat belajar bagi anak-anak pemulung tersebut. Padahal kala itu kondisi ekonomi keluarganya tak bisa dibilang mapan. Ia dan keluarganya masih tinggal di sebuah kontrakan.

Kendati demikian keluarganya tidak mempermasalahkan hal itu. Istri Aiptu Agus bahkan merasa senang karena suaminya bisa membantu anak-anak untuk bersekolah. "Rumah aja masih ngeontrak malah ngutang buat bangun sekolah. Tapi seneng sih anak-anak jadi sekolah," kata istrinya Agus.

TPA Maju Bersama

Saat ini tempat belajar yang Aiptu Agus bangun telah menjadi sebuah sekolah paket yang dinamai Sekolah Percaya dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang dinamai TPA Maju Bersama. Tempat belajar tersebut kini telah menjadi harapan bagi sekitar 80 anak yang menimba ilmu di sekolah itu. "Awalnya sih cuma delapan anak, alhamdulillah sampai saat ini bisa sampai 80 anak," kata Aiptu Agus dengan penuh rasa syukur.

Walaupun Aiptu Agus membangun sekolah dengan berutang, hal tersebut tak lantas menjadikannya menarik bayaran kepada anak-anak. Ia mensiasati biaya operasional sekolah dengan cara memanfaatkan sampah yang dikumpulkan oleh anak-anak tiap dua minggu sekali.

"Karena sekolah ini di tempat pemulung, kita manfaatkan sampah sebagai sumber pendanaan. Sampah-sampah ini kita jual, hasilnya digunakan untuk keperluan sekolah. Dengan cara ini, anak-anak belajar untuk mandiri," jelas Agus.





“Semoga dedikasi yang dilakukan oleh Aiptu Agus Riyanto bisa menjadi role model bagi anggota lain agar bisa terus berprestasi dan berbuat terbaik untuk Polri dan negara, dan teruslah berbuat baik,”



Dalam menjalankan roda pendidikannya, Aiptu Agus kini tak sendiri, ia digandeng oleh relawan serta elemen masyarakat setempat yang membantu mengajar dengan sukarela.

“Guru-guru di sini adalah relawan yang sudah lama mendukung program ini. Semangat mereka luar biasa, sama seperti semangat anak-anak yang belajar di sini,” tambah Agus.

Aiptu Agus menjadi contoh sosok yang berhasil membuktikan bahwa dedikasi dan kepedulian bisa mampu mengubah kehidupan. Sekalipun dengan kondisi penuh tantangan, Aiptu Agus dengan mantap bisa membantu mewujudkan mimpi-mimpi calon penerus bangsa.

“Saya tidak akan pernah takut dengan kekurangan yang saya miliki karena saya yakin Allah akan memberikan kekuatan untuk mendidik anak ini,” kata Aiptu Agus.

Aksi kepedulian Aiptu Agus terhadap pendidikan anak-anak tidak mampu tersebut menuai apresiasi dari pucuk pimpinan Korps Bhayangkara berupa tiket Sekolah Alih Golongan (PAG) tahun 2025 yang akan membantunya naik pangkat dan memperluas kesempatan mengabdi kepada masyarakat.

Penghargaan secara simbolis disampaikan Kepala Biro Perawatan Personel Polri Brigjen Budhi Herdi Susianto di gedung TNCC Mabes Polri, Kamis 30 Januari 2025.

“Semoga dedikasi yang dilakukan oleh Aiptu Agus Riyanto bisa menjadi role model bagi anggota lain agar bisa terus berprestasi dan berbuat terbaik untuk Polri dan negara, dan teruslah berbuat baik,” kata Brigjen Budhi Herdi.

Aiptu Agus pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dari atasannya tersebut.

“Sebagai anggota kepolisian, tugas kami bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya hanya ingin anak-anak di lingkungan binaan saya punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Aiptu Agus dengan rendah hati. [*]

Dinas yang Menjadi Hobi dan Sukarela Mengawal Ambulans

Ia tergerak mengawal ambulans karena menurutnya ambulans harus cepat sampai tujuan, baik mengantar pasien atau dalam kondisi kosong untuk menjemput pasien.

Menjelang H-3 Lebaran 2025 arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek itu benar-benar padat. Mobil berbagai jenis seolah tak ada putusnya melaju. Meski tak sampai macet, padatnya arus lalu lintas membuat pengendara tak leluasa bermanuver. Tak terkecuali sebuah mobil jenazah milik TNI.

Meskipun dikawal Polisi Militer tetap saja ambulans itu tertahan padatnya arus lalu lintas. Bahkan, beberapa mobil dari rombongan itu tercerai jauh di belakang. Mobil jenazah yang semestinya mendapat prioritas itu stuck dan tertahan.

Sementara sang sopir ambulans mencoba terus mencoba bermanuver, entah dari mana datangnya suara sirine terdengar melengking. Sebuah motor gede bekelir putih biru milik Polri tiba-tiba menelusup dan langsung beraksi. Dengan gerakan halus ia meliuk dan membelah arus lalu lintas yang padat.





"Ada berapa rangkaian pak?" tanya penunggang moge itu kepada PM yang bertindak sebagai voorijder atau pengendara depan. "Ada lima," jawab personel PM itu sembari mengacungkan kelima jarinya. "Kita bantu depan ya! Tujuan kemana?" tanyanya lagi. "Majalengka!". "Berarti Cikampek lurus ya!"

Beres dengan dialog singkat itu, sang polisi kembali melesat ke depan. Sementara sirennya yang khas kembali melengking, moge itu kembali meliuk sembari melambaikan tangan meminta jalur atau memberi jempol sebagai apresiasi. Sesekali terlihat bertukar tangan di setang, aksi itu bagaimanapun menunjukkan bahwa penunggang moge itu benar-benar mahir mengendalikan kuda besinya."

Ambil kiri dulu pak ada ambulans jenazah,

ki dulu Pak. Terima kasih," sesekali kata si penunggang moge itu kepada pengendara lainnya.

Setelah nyaris tuntas menjelajah ruas Tol Jakarta-Cikampek dan lalu lintas terurai, moge itu memperlambat lajunya. Ia mempersilahkan rombongan melaju ke tujuan. Apresiasi ditunjukkan rombongan dengan hormat militer dan bahasa tubuh terima kasih keluarga. Ya, di lapangan, slogan sinergitas TNI-Polri telah menjadi praktik sehari-hari.

"Hari ini kita bantu rekan kita dari TNI yang mengalami keduakan. Sepertinya anggota juga yang meninggal karena menggunakan mobil jenazah TNI juga. Semoga di bulan puasa ini semua mendapatkan berkahnya. Ada hikmah di balik semua itu, dan semoga bisa sampai di tujuan dengan aman dan selamat,"



kata polisi itu sesaat setelah menepikan motor patrolinya.

Polisi penunggang moge itu adalah Ipda Abster M Wongkar personel Patwal Provos Korpelairud Baharkam Polri. Ia acap kali menuai simpati karena mendokumentasikan aksinya dan mengunggahnya ke media sosial pribadi yang memiliki ratusan ribu pengikut. Pada akun Tiktok @abster.m.wongkar apresiasi mengalir atas aksinya itu.

"Terima kasih bg salam sinergitas...almarhum salah satu perwira berpangkat kapten di kantor kami. semoga menjadikan ladang pahala buat abng abster" tulis akun Tiktok @ar**.

"Polisi militer yg hormat, gue yg nangis.." tulis akun@iqnami**. "Makasih pak pol itu ayah saya, jenazahnya itu mau di bawa ke indramayu dimakamkan disana makasih telah membantu perjalanan ayah saya.." tulis akun @Risky An**

Ikhlas

Abster memang viral karena aksinya yang kerap mengawal ambulans di jalan yang dilakukannya disela kegiatannya saat berdinbas. Kebiasaan itu bermula saat ia seringkali berpapasan dengan ambulans yang terjebak macet. Ia tergerak untuk memberikan pengawalan karena menurutnya, ambulans harus cepat sampai tujuan, baik itu mengantar pasien atau dalam kondisi kosong menjemput pasien.

Sejak saat itulah Abster mulai melakukan pengawalan terhadap ambulans-ambulans yang ditemui di jalan.

"Nah melihat itu, kita secara urutan prioritas, ambulans ini kan nomor dua ya secara undang-undang kendaraan yang harus diutamakan nomor dua sebelumnya kan damkar. Ketika melihat itu, saya sebagai polisi, tugas dasar saya adalah melindungi, melayani, mengayomi masyarakat," kata dia.

Abster bercerita sebelum dirinya menjadi polisi, dia sudah

hobi otak-atik mesin. Beruntung ia lantas diterima menjadi anggota polisi sebagai bintara teknik di perkapalan.

"Jadi otak-atik mesin kapal mesin kapal yang besar, habis itu tujuh tahun kurang lebih di kapal, mutasi ke Provost. Nah di Provost, saya langsung di bagian unit motor ya sudah kerja sambil menjalani hobi," kata dia.

Mahir

Tentu saja, mengemudikan motor besar sembari memberikan pengawalan tentu bukan pekerjaan mudah. Ia belajar di Divisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mulai dari mendorong motor, mengenal beban kendaraan, hingga mengangkat motor dari posisi terjatuh.

"Karena pada saat pengawalan kita itu udah harus kuasai motor, karena kita harus tahu rute jalan kita mau ke mana, kita harus mikirin rangkaian yang kita bawa tujuannya," kata dia.

"Terus belum lagi kita main sirene seperti apa. Harus ngarahin kendaraan lain, belajar ngegas pakai tangan kiri karena apa, tangan kanan buat ngarahin kendaraan yang dari sebelah kanan. Jadi kecepatan motor harus tetap dijaga, tapi juga kita harus juga nuntun masyarakat yang lain untuk memberikan prioritas terhadap kendaraan yang kawal," lanjut Abster.

Anggota Polri angkatan 11 Bintara TA. 2009 Polair atau Leting 2009 (LDS) ini mengaku memiliki beragam pengalaman saat berdinbas, khususnya di jalan raya. Mulai dari pengawalan ambulan, menolong kecelakaan hingga menegur pengguna jalan yang tidak patuh lalu lintas.

Hobi Abster mengawal ambulans terus berlanjut hingga saat ini. Konten video yang dimuat di akun Instagram, Youtube, maupun TikTok itu menyedot banyak perhatian publik Tanah Air. Di akun Instagram, Abster sudah memiliki 350 ribu pengikut. Pun demikian dengan di TikTok,



followersnya nyaris 731 ribu akun. Sementara di Youtube, ada 206 ribu subscriber.

Abster kerap mendapat puji atas aksinya itu.

Di sisi lain, aksi pengawalan secara cuma-cuma itu juga membuat Abster bahagia karena bisa menolong orang lain sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Banyak nilai positif yang bisa diambil dari konten-konten saya, bisa dicontohin juga oleh rekan-rekan lainnya, edukasi ke masyarakat. Karena kadang udah kita edukasi juga tetap melanggar, apalagi kalau nggak ada," kata dia.

Keikhlasan Abster membantu masyarakat di jalan, tidak lepas dari motto hidupnya yaitu 'Teruslah berbuat baik, karena berbuat baik itu membuat kita bahagia'.

Ia mengaku, sebagai anggota polisi dirinya mengaku memegang teguh sumpah kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Hal tersebut yang ia terapkan di kehidupan sehari-hari selama berdinbas.

"Saya disumpah oleh Polri, untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Sumpah itu yang saya terapkan dalam hal pelayanan apapun kepada masyarakat, itu yang menjadi motivasi saya membantu saat di jalanan," kata Abster. [*]



Rajut Kebersamaan Nyalakan Kemilau Kebahagiaan





**INOVASI
DIVHUMAS**
Biro Penmas Polri
Majalah Tribrata News
Tersedia Online



www.humas.polri.go.id